

ANNUAL REPORT

Terus Melangkah



2019

VISI

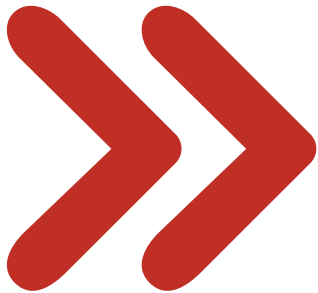
Mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan sosial di mana setiap orang menikmati hak untuk menjalani kehidupan yang **setara, mandiri dan bermartabat**.

MISI

Mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengembangkan kewarganegaraan yang aktif melalui pendidikan kritis tentang demokrasi berdasarkan pengalaman lapangan YAPPIKA-ActionAid, **peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, advokasi kebijakan yang menjamin semua warga negara memiliki akses untuk hak-hak dasar mereka.**

NILAI

- 1 Solidaritas** dengan Orang yang Hidup dalam Kemiskinan dan Termarjinalkan, akan menjadi satu-satunya bias dalam komitmen kami untuk memerangi kemiskinan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.
- 2 Independensi** dari afiliasi agama atau partai-politik; tidak menerima pendanaan yang berasal dari hutang; perusahaan yang secara jelas diketahui melakukan kerusakan lingkungan, mempekerjakan pekerja anak, merugikan pekerja dan melanggar hak asasi manusia; kerja sama langsung dengan lembaga keuangan internasional; menerapkan praktik korupsi dalam penyaluran dana bantuan; tidak berafiliasi dengan (bukan bagian dari, tidak bertanggung jawab, tidak bekerja untuk) partai politik atau kandidat independen yang memperebutkan posisi di pemerintahan, tetapi dapat bekerja sama dengan partai politik dalam mencapai tujuan visi dan misi YAA. Semua staf dan manajemen organ organisasi YAA tidak boleh menjadi fungsionaris partai.
- 3 Kesetaraan dan Keadilan**, menuntut kami untuk memastikan perwujudan visi kami untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual dan identitas gender, ras, suku, kasta, kelas, usia, status HIV, disabilitas, lokasi, dan agama.
- 4 Tanpa Kekerasan**, tidak mentolerir kekerasan fisik dan psikologis.
- 5 Saling Menghormati**, menuntut kita untuk mengakui nilai bawaan semua orang dan nilai keragaman.
- 6 Nirlaba**, surplus yang diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh YAA untuk digunakan untuk inisiatif perubahan sosial dan tidak dibagikan menjadi keuntungan bagi fungsionaris YAA.
- 7 Keberlanjutan**, mengharuskan kami menjadi organisasi yang sadar lingkungan serta memastikan bahwa inisiatif perubahan sosial kami mengutamakan prinsip keberlanjutan dengan memberdayakan dan memungkinkan masyarakat sebagai agen utama perubahan.





PRINSIP KERJA

- 1 Akuntabel**, peran dan hasil kerja bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan utama dan publik.
- 2 Transparan**, membuka akses kepada masyarakat atas apa yang telah dilaksanakan YAA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Partisipatif**, selalu berupaya melibatkan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan.
- 4 Relawan**, selalu menumbuhkan kesukarelaan dan dedikasi di antara staf dalam bekerja untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
- 5 Non-eksploitatif**, terhadap staf, relawan, dan mitra kerja.
- 6 Profesional**, bekerja dengan mengedepankan kualitas kerja berdasarkan kompetensi dan keahlian yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan (efektif dan efisien), serta senantiasa mengembangkan inovasi dan pembelajaran berkelanjutan bagi institusi.

A

Program Kerja 2019 Capaian

Prioritas Program 1 4

Program Sekolah Aman 4

Ruang Kelas Baru untuk Feby 5

Good Leader, Good Teacher 6

Reza Rahadian, Sekolah Aman 7

Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas bagi Semua Anak di Indonesia 9

Capaian dalam Angka 10

Eksan Kembali Bersekolah 11

Pro-InQlued Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bima 13

Analisis Anggaran Pendidikan 16

Program #AnakSehat 20

Ibu Rihana 23

50 Kebun Gizi Keluarga 27

Program Penguatan terhadap Aparat Pemerintahan Daerah dalam Optimalisasi Penggunaan SP4N-LAPOR! dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 20

Capaian dalam Angka 29

Pengaduan Pelayanan Publik Mobile 30

Prioritas Program 2 35

Penguatan Kapasitas Mitra-Mitra Program YAA 35

Quote 36

Peninjauan Kapasitas dan Kinerja Mitra Program SETAPAK II Menggunakan OCPAT 37

Hasil Evaluasi Peserta OCPAT 38

Prioritas Program 3 40

Koalisi Kebebasan Berserikat 40

Peningkatan Kapasitas Monitoring dan Advokasi Pelayanan Publik bagi Kelompok Keberagaman Gender 42

KKB Konsisten Mendorong Pengesahan RUU Perkumpulan 45

Quote 46

Prioritas Program 4 47

Program Emergency Response and Recovery Sulawesi Tengah 47

Capaian 48

Riset Women-led Localisation in Central Sulawesi 49

Mama Minuk 52

Program Perlindungan Berbasis Komunitas yang Dipimpin Perempuan (Women-led Community Based Protection) 55

Capaian 56

Ibu Ratna Sang Penjaga 57

B

LAPORAN PENGALANGAN DANA

Capaian 63

Quote Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI 64

Quote Donatur 65

C

TATA KELOLA LEMBAGA & REPUTASI

Penyusunan CSP 69

Training SHEA & Safeguarding 77

Laporan Tahunan 2019 “Terus Melangkah”

Ketua Board dan Direktur Eksekutif Yappika-ActionAid

Banyak hal penting bagi YAPPIKA-ActionAid (YAA) pada 2019. Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Country Strategy Paper (CSP) yang baru **“Empowering People, for Social Justice and Deepening Democracy”**, paska bergabung dengan Federasi ActionAid International pada pertengahan 2016. CSP tersebut adalah rencana strategis YAA dalam jangka panjang dari 2019-2028, yang memuat empat prioritas program dan tiga prioritas organisasi untuk 10 tahun ke depan.

Sepanjang 2019 penegasan komitmen YAA terhadap kerja kemanusiaan semakin jelas. Gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 serta di Pandeglang dan Serang pada 22 Desember 2018 menjadi momentum awal bagi YAA untuk bekerja dalam tanggap bencana dan resiliensi. Dua aksi kemanusiaan ini selanjutnya ditambahkan dalam CSP sebagai Prioritas Program 4 – **Humanitarian and Resilience** di dalam CSP sebelum disahkan oleh Pembina YAA.

Kekhasan pendekatan aksi kemanusiaan YAA adalah pemenuhan hak perempuan, akuntabilitas kepada masyarakat terdampak bencana, dan pergeseran kekuasaan ke tingkat lokal. Pemenuhan hak perempuan dalam aksi kemanusiaan YAA ditandai dengan membangun kepemimpinan perempuan dan perlindungan perempuan dan kelompok rentan lain yang terdampak bencana. Ibu Ratnawati dari Pandeglang adalah

sebagian kecil perempuan penyintas bencana yang telah menginspirasi masyarakatnya. Mereka merupakan contoh bagaimana bencana menjadi momentum bukan hanya untuk pulih kembali tetapi menjadi lebih tangguh dari sebelum bencana terjadi.

Tahun 2019 ini juga dirasakan tepat untuk meluncurkan kampanye **Siap-Siap Bencana** sebagai tema baru penggalangan dana publik. Serupa dengan advokasi Sekolah Aman dan Anak Sehat yang telah berjalan lebih dahulu dengan dukungan dana publik. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat rawan bencana, YAA merasa bahwa aksi kemanusiaan perlu mendapatkan dukungan pendanaan dari masyarakat secara berkelanjutan. Bukan hanya pada saat terjadi bencana, tetapi terlebih pada pra dan paska bencana untuk membangun ketangguhan masyarakat yang rentan bencana. YAA membangun resiliensi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak melalui kegiatan pelatihan pengurangan resiko bencana, membuat peta bencana berbasis komunitas, dan membuat jalur-jalur evakuasi di desa.

Kisah Eksan dan Feby menunjukkan pentingnya peran masyarakat, baik terlibat langsung dalam advokasi pendidikan maupun dalam bentuk dukungan dana. Program **Sekolah Aman** YAA berupaya menjembatani kedua bentuk peran masyarakat tersebut, yaitu advokasi bersama dengan 86 komunitas sekolah di Kabupaten Serang, Bogor, Sambas, Bima, Kupang, dan Sumba Barat dan penggalangan dana publik untuk advokasi. Di mana integrasi keduanya kami lihat akan membuka sebuah gerakan sosial untuk perbaikan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Kita tidak bisa terus menunggu. Masih terdapat puluhan ribu Eksan lain yang putus sekolah karena miskin, akses sekolah yang jauh, atau karena kurangnya perhatian orang tua. Sementara juga terdapat jutaan Feby lainnya yang terancam bahaya setiap hari karena bersekolah di ruang kelas yang rusak atau bahkan hampir roboh.



Integrasi pengurangan resiko bencana dengan pendidikan

mulai dilakukan dalam Program Sekolah Aman di sekolah-sekolah dampingan di Kabupaten Pandeglang dan Serang. Hal ini sebagai respon YAA melihat sekolah-sekolah terdampak bencana di dua kabupaten tersebut, di mana lokasi sekolah tidak bisa dipindahkan dan tetap berada di zona rawan bencana. Di lokasi program ini, pendidikan resiko bencana dilakukan oleh ibu-ibu penyintas bencana, yang menjadi focal point setelah mengikuti berbagai kegiatan penguatan kapasitas melalui rumah ramah perempuan (women friendly space), termasuk kapasitas pengurangan resiko bencana.

Pemberdayaan perempuan dalam Program **Anak Sehat** telah memunculkan Ibu Rihana. Seorang perempuan biasa, kader Posyandu yang menginspirasi dengan keberhasilannya mendesak adanya alokasi anggaran desa untuk pemberian makanan tambahan (PMT) dan pelatihan bagi kader Posyandu. Para perempuan juga menjadi pionir di desa-desanya dalam mengembangkan makanan sehat untuk mencegah stunting melalui kebun gizi di halaman rumah masing-masing maupun lahan bersama.

YAA tetap memberikan layanan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil kepada organisasi selain mitra program. Pada 2019 ini penguatan kapasitas fokus pada peninjauan akhir perubahan kapasitas dan kinerja 30 organisasi yang tersebar di 10 provinsi. Peninjauan dilakukan menggunakan alat **OCPAT (Organisational Capacity and Performance Assessment Tool)** yang disusun YAA agar organisasi bisa mengukur kemajuan tata kelola internalnya, seperti orientasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan serta pencapaian kinerjanya.

YAA sendiri juga terus meningkatkan tata kelola kelembagaan, baik dengan meninjau kembali rencana strategis agar lebih sesuai dengan perubahan konteks eksternal maupun internal sebagai anggota Federasi ActionAid Inter-

national maupun kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan.

SHEA (Sexual Harrassment, Exploitation and Abuse) and Safeguarding telah diadaptasi dan disahkan sebagai kebijakan resmi YAA. Proses adopsi tidak berhenti pada pengesahan formal dari Pembina YAA, tetapi dengan memberikan pelatihan bagi semua staf YAA dan staf mitra *Program Emergency Response and Recovery (ERR)*, menunjuk *focal point* di tingkat Pelaksana dan Pengurus, memasukkannya dalam dokumen kesepakatan dengan mitra Program ERR, meminta semua staf menandatangani kepatuhan terhadap kebijakan ini, dan melaksanakan survai untuk memantau tingkat pemahaman maupun status kepatuhan. YAA berkomitmen untuk terus menyebarkan kebijakan ini kepada semua mitra.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menumbuhkan lingkungan pendukung yang kondusif bagi masyarakat sipil, YAA terus melanjutkan **advokasi kebebasan berserikat dan berorganisasi**. Lebih dari satu setengah dekade advokasi dilakukan bersama dengan koalisi masyarakat sipil dengan fokus memperbaiki aturan-aturan hukum di berbagai tingkatan bagi kebebasan berserikat dan berorganisasi. Termasuk bersama Komnas HAM menyusun draf Standar Norma dan Petunjuk tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi yang telah disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No. 5/SP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, serta menyusun Buku Panduan Pemberian Sumber Daya bagi OMS dan Buku Panduan Mitigasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.

Meskipun banyak yang bisa dicapai pada 2019, tetapi jalan masih jauh menuju masyarakat berdaya untuk keadilan sosial dan pendalaman demokrasi. **Kami berterima kasih** kepada para donor baik individu, lembaga, maupun perusahaan atas dukungan luar biasanya; para mitra dan komunitas kerja sama dalam membuat perubahan; para public campaigner dan staf yang penuh dedikasi; dan seluruh anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas YAA. Bersama dengan Anda semua, kami **terus melangkah** untuk membuat perubahan menjadi nyata.

A | Program Kerja 2019 - Capaian

Prioritas Program Kami

Berdasarkan Country Strategy Paper 2019-2028 'Empowering People, for Social Justice and Deepening Democracy', YAA menetapkan empat prioritas program sebagai berikut.

Prioritas Program 1: Pelayanan Publik yang Inklusif dan Responsif Gender

Prioritas program ini mencakup advokasi pemenuhan hak dasar pelayanan publik bagi kelompok rentan dan marjinal melalui promosi pendekatan berbasis hak dan pelayanan publik berkualitas yang responsif gender.

Terdapat empat program dalam prioritas program 1, yaitu:

1. Program Sekolah Aman
2. Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas bagi Semua Anak di Indonesia
3. Program Anak Sehat
4. Program Penguatan terhadap Aparat Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penggunaan SP4N-LAPOR! dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

Prioritas Program 2: Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam prioritas program ini, YAA melakukan penguatan kapabilitas organisasi masyarakat sipil untuk membangun kemandirian, kewargaan yang aktif, dan arena publik.

Terdapat dua program dalam prioritas program 2, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Mitra-Mitra Program YAA
2. Peninjauan Kapasitas dan Kinerja Mitra Jaringan

Prioritas Program 3: Advokasi Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil

Prioritas program ini memayungi advokasi untuk terciptanya lingkungan pendukung yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sipil yang sehat untuk menjalankan peran-perannya.

Terdapat satu program dalam prioritas program 3, yaitu advokasi atas jaminan kebebasan berserikat dan berorganisasi.

Prioritas Program 4: Aksi Kemanusiaan dan Ketangguhan

Dalam prioritas program ini YAA mulai membangun ketangguhan komunitas yang rentan terhadap bencana dan memastikan keselamatan dan keamanan perempuan, remaja perempuan, dan kelompok rentan.

Terdapat dua program dalam prioritas program 4, yaitu:

1. Program Emergency Response and Recovery Pasigala Sulawesi Tengah.
2. Program Perlindungan Berbasis Komunitas yang Dipimpin Perempuan (Women-led Community Based Protection) Banten.

Prioritas Program 1

Pelayanan Publik yang Inklusif dan Responsif Gender

YAA melanjutkan advokasi bersama warga dan mitra organisasi masyarakat sipil dalam mengubah kualitas dan akses pendidikan agar lebih inklusif dan responsif gender, serta aman dari bencana. Pada sektor kesehatan, YAA melanjutkan kontribusi dalam mengurangi jumlah anak penderita *stunting* dan meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. YAA juga berupaya melakukan advokasi layanan hak dasar lainnya untuk memastikan semua hak dasar warga dipenuhi oleh pemerintah. **Perempuan menjadi pusat dalam tim advokasi warga dan diakui sebagai pemimpin.**

1. Program Sekolah Aman

Berdasarkan riset yang dilakukan di Indonesia oleh YAA pada 2019, lebih dari 196.708 ruang kelas sekolah dasar rusak atau 1 dari 6 ruang kelas sekolah dasar rusak. Dengan kata lain, 1 dari 8 anak sekolah dasar terancam bahaya sekolah roboh setiap harinya. Sementara dengan alokasi anggaran yang ada, pemerintah akan membutuhkan 21 tahun untuk bisa menyelesaikan perbaikan semua sekolah rusak tersebut.

Dalam konteks di atas, YAA melanjutkan Program#SekolahAman yang telah dimulai sejak 2016 di tiga kabupaten, yaitu Serang Provinsi Banten, Bogor Provinsi Jawa Barat, dan Kupang Provinsi NTT, bekerja sama dengan PATTIRO Banten di Kabupaten Serang, Kopel Indonesia di Kabupaten Bogor, dan Bengkel APPEK di Kabupaten Kupang. Pelaksanaan program ini didukung oleh publik yang digalang YAA melalui berbagai saluran donasi. Melalui program ini, YAA berkontribusi pada pemenuhan hak anak atas infrastruktur pendidikan dasar yang layak dan aman dari bencana. YAA melakukan advokasi agar terjadi peningkatan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian permasalahan pendidikan dasar, terkait infrastruktur yang layak dana dan aman dari bencana.

Ruang Kelas Baru Untuk Feby

Feby, si kecil pemberani ini adalah murid kelas 2 SDN Inpres Raknamo, Kabupaten Kupang. Seperti anak-anak lainnya, Feby mempunyai cita-cita. Ia punya mimpi suatu saat nanti bisa menjadi seorang guru.

Feby rajin dan begitu bersemangat untuk ke sekolah. Setiap harinya, Feby harus menempuh perjalanan cukup jauh, untuk sampai ke sekolah dampingan **YAPPIKA-ActionAid** bersama dengan **Bengkel APPeK** itu.

“Sebelum diperbaiki, kondisi sekolah Feby dan teman-temannya ini begitu buruk.”

Ruang kelasnya tanpa plafon, menyebabkan bising suara dari kelas sebelahnya terdengar keras di kelasnya. Ruang kelas yang kumuh itu juga tak mampu meredam hawa panas

siang hari. Saat musim hujan, atap kelasnya juga sering bocor, sehingga mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

Bersyukur, pada 1 Agustus 2019, bangunan sekolah SD Inpres Raknamo telah berhasil direnovasi, berkat penggalangan dana yang difasilitasi oleh **YAPPIKA-ActionAid** serta bantuan dari **Tzu Xing Foundation**, Taiwan. Dana ini telah digunakan untuk membangun kembali 3 ruang kelas, ruang UKS, dan toilet terpisah untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki, pada masing-masing sekolah dasar tersebut.

Kini Feby, serta anak-anak lain di SDN Raknamo, bisa belajar dalam kondisi yang aman dengan gedung baru yang kokoh dan nyaman. ***

Good Leader, Good Teacher

Menandai selesainya perbaikan tiga ruang kelas rusak di SDN Leuwiranji, Bogor, Jawa Barat yang didukung oleh **PT Paragon** dan difasilitasi oleh **YAPPIKA-ActionAid** dan **KOPEL** Indonesia, kami mengadakan kegiatan bertajuk **“Good Leader, Good Teacher”** pada Sabtu, 31 Agustus 2018.

Kegiatan ini melibatkan para karyawan **PT Paragon** yang memimpin aneka kegiatan yang melibatkan seluruh murid, guru, orang tua murid, dan perangkat pemerintah desa setempat. Mereka memimpin anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris, kelas inspirasi tentang bagaimana pekerjaan profesional dalam meramu bahan-bahan menjadi aneka produk lotion, kelas permainan edukasi, kelas kreasi seni mural dinding ruang kelas, dan kelas tata rias bagi para orang tua perempuan.





Reza Rahadian Mempromosikan Program Sekolah Aman

Kunjungan Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid, Reza Rahadian, di SDN Onitua, Kabupaten Kupang.

Reza Rahadian, aktor Indonesia terkenal yang menjadi Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid, secara khusus telah mengangkat isu pentingnya sekolah yang aman bagi siswa.

Pada tahun 2019, ia telah mengunjungi tiga kabupaten dampingan YAPPIKA-ActionAid, guna melihat langsung kondisi ruang belajar yang tidak memadai. Ia juga melakukan audiensi dengan pihak yang berwenang di tingkat kabupaten untuk menyampaikan program advokasi kebijakan oleh YAPPIKA-ActionAid yang bertajuk #SekolahAman.

#SekolahAman bertujuan menjamin pemenuhan hak anak atas infrastruktur pendidikan dasar, yang layak dan aman

dari bencana, melalui peningkatan anggaran di tingkat APBD dan APBN. Berdasarkan catatan YAPPIKA-ActionAid, 1 dari 6 ruang kelas sekolah dasar di seluruh Indonesia, dalam kondisi tidak layak digunakan karena rusak dan kumuh. Dengan kata lain, setiap hari ada 1 diantara 8 anak sekolah dasar yang terancam bahaya tertimpa sekolah yang roboh.

Sebagai Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid, Reza Rahadian pada Juli 2019, berkunjung ke Kabupaten Kupang yang data kondisi ruang kelasnya memprihatinkan: hanya 20,9% dari 2.459 total ruang kelas di Kabupaten Kupang dalam kondisi baik; sebanyak 228 ruang kelas (9,3%) dalam kategori rusak sedang; dan 575 ruang kelas



Wakil Bupati Kupang Bapak Jerry Manafe diapit oleh Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid, Fransisca Fitri, dan Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid, Reza Rahadian, dalam forum audienasi untuk advokasi Program Sekolah Aman.

(23,4%) dalam kategori rusak berat. Sementara itu, pada tahun ajaran 2017/2018 juga terdapat kekurangan jumlah ruang kelas sebanyak 61 unit.

Dalam kunjungan dua hari itu, Reza Rahadian dan tim YAPPIKA-ActionAid telah melihat kondisi ruang belajar darurat di SDN Dendeng dan SDN Onitua yang kumuh, beratap daun gewang kering, berlantai tanah berdebu dan berkerikil karang, serta berdinding pelepah gewang. Namun begitu, para guru dan kepala sekolah tetap menunjukkan dedikasi, dalam mengajar dan anak-anak tetap antusias bersekolah.

Reza juga turut serta dalam audiensi dengan jajaran Pemda setempat. Dari audiensi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sangat sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan APBD untuk perbaikan fasilitas sekolah. Kabar dan dokumentasi foto maupun video kunjungan Reza ke sekolah rusak tersebut menuai banyak perhatian masyarakat, salah satunya dari seorang filantropis Taiwan yang berdonasi untuk perbaikan ruang kelas rusak maupun membangun kelas-kelas baru. Ada empat SD yang berhasil diperbaiki, yaitu SDN Dendeng, SDN Onitua, SDN Raknamo, dan SDN Bimous.

Program #SekolahAman dilakukan oleh YAPPIKA-ActionAid sejak 2016 di tiga kabupaten, yaitu Serang (Provinsi Banten, bekerja sama dengan Pattiro Banten), di Bogor (Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Kopel Indonesia), dan di Kupang (Provinsi NTT, bekerja sama dengan Bengkel APPeK).

2. Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas bagi Semua Anak di Indonesia

Selain permasalahan infrastruktur sekolah rusak, Indonesia juga menghadapi permasalahan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga miskin, yang mengakibatkan mereka putus sekolah. Berdasarkan data BPS, pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 57,426 anak (24,140 perempuan; 33,286 laki) sekolah dasar putus sekolah. Pada 2017 terdapat 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan sebanyak 70% anak berkebutuhan khusus tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas bagi Semua Anak di Indonesia telah berjalan sejak 2018 di Kabupaten Sambas, Bima, dan Sumba Barat. Dalam program ini YAA bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Swandiri (GEMAWAN) di Sambas, Yayasan BAHTERA di Sumba Barat, dan Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) di Bima melalui dukungan pendanaan dari Uni Eropa, ActionAid UK, dan publik. Dengan program ini, YAA berkontribusi pada tata kelola yang baik dan akuntabilitas di sektor pendidikan di Indonesia, sejalan dengan SDG#4, melalui keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses-proses pembangunan.

CAPAIAN DALAM ANGKA

SEKOLAH AMAN DAN PROMOSI PRAKARSA



86
Total
Sekolah
Dampungan

18 di Kabupaten Bogor
Kabupaten Serang

10 di Kabupaten Bima
Kabupaten Sambas
Kabupaten Sumba Barat

2 di Kabupaten Pandeglang

13 Jumlah
Sekolah Dampungan
Baru

2091 Jumlah Total
Komunitas Sekolah
945 1.146

Keberhasilan Advokasi dalam Meningkatkan Anggaran Rehabilitasi Sekolah

Sebanyak **17 sekolah** dampungan di **Kabupaten Bima, Sumba Barat dan Sambas** berhasil mengadvokasi anggaran pemerintah untuk rehabilitasi sekolah sebesar

7,7M untuk **78 Kelas**

Sebanyak **13 sekolah** dampungan di **Kabupaten Bogor, Serang dan Kupang** berhasil mengadvokasi anggaran pemerintah untuk rehabilitasi sekolah sebesar

5,9M untuk **37 Kelas**



Dari
13,6 M
anggaran terkumpul



Ada
3,840
anak telah
diselamatkan



Eksan Kini Kembali Bersekolah



Eksan Datu Koda, adalah salah satu dari 85 siswa SDI Hoba Jangi, yang terletak di **Desa Balikoku**. Salah satu sekolah dampingan YAPPIKA-ActionAid bersama Yayasan Bahtera ini berada di wilayah Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat.

Pada tahun ajaran 2018, Eksan dinyatakan tinggal kelas, karena berbagai alasan. Seperti selalu terlambat dalam belajar, tidak fokus bila berada dalam kelas, dan tingkat kehadiran yang sangat kurang. Meskipun dalam penentuan kenaikan kelas, sempat terjadi perdebatan antar guru, karena Eksan pernah tiga kali tidak naik kelas. Para guru berpendapat, jika dipaksakan untuk naik kelas, Eksan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi Ujian Nasional.

Usai libur kenaikan kelas, Eksan tak lagi bersekolah. Para guru pun mulai mempertanyakan keberadaan Eksan. Satu bulan berlalu, salah satu guru, yaitu Bapak Mawu Lobu, berkunjung ke rumah orangtua Eksan untuk mengetahui alasan Eksan tak bersekolah. Jawaban orang tua Eksan begitu sederhana,

“Eksan merasa malu, karena tinggal kelas berulang kali, sementara teman-teman yang lain naik kelas.”

Saat itu juga, Bapak Mawu Lobu menghimbau orangtua Eksan agar

dapat mengantarkan anaknya kembali bersekolah. Guru Mawu Lobu juga menyampaikan, bahwa Eksan adalah siswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), sehingga jika Eksan tak bersekolah maka uang tersebut akan dikembalikan ke pemerintah.

Dua bulan berlalu, Eksan tetap tidak kembali bersekolah. Ketika komunitas sekolah SDI Hoba Jangi melakukan identifikasi anak putus sekolah, nama Eksan menjadi salah satu anak yang wajib dikembalikan ke sekolah. Ketua dan anggota komunitas lainnya sepakat untuk melakukan kunjungan rumah dan pendekatan kepada orangtua Eksan. Bahkan komunitas sekolah juga bersepakat agar guru dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di luar jam belajar bagi Eksan.

Tidak mudah setiap bulan, bapak-ibu guru serta pendamping dari Yayasan Bahtera mengunjungi Eksan di rumahnya, mengajak berdialog dan membujuknya agar kembali ke sekolah. Setelah berulang-kali dibujuk oleh orangtua dan bapak-ibu guru, akhirnya Eksan mau kembali ke sekolah.

Pada tahun ajaran baru 2019, Eksan kembali mengikuti pelajaran di SDI Hoba Jangi. Ia kembali bersekolah seperti anak-anak lain. Namun karena kondisinya berbeda dari anak-anak lain, maka ia berhak mendapatkan perlakuan dan pendampingan khusus.

#PendidikanInklusif

Pro-InQlued Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bima

Pro-InQluEd adalah akronim dari *Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia*, yaitu program mendorong prakarsa masyarakat sipil untuk pendidikan inklusif dan berkualitas di Indonesia yang digagas oleh Yappika-ActionAid didukung oleh Uni Eropa dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Adapun ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak-anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Oleh karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), program ini bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Bima dan organisasi non-pemerintah Solud sebagai mitra lokal. Kabupaten Bima dipilih sebagai wilayah garap program Pro-InQluEd, karena Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Hal ini dipertegas oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer dalam dua pertemuan dengan tim Yappika-ActionAid dan tim Uni Eropa pada 14 Mei 2019.

Pada pendataan terhadap 10 SD Negeri di Kabupaten Bima diperoleh angka terdapat 12 orang siswa ABK dari kategori terbelakang mental, autis, gagap, dan kecerdasan kurang. Apabila angka ini digunakan sebagai asumsi rerata, maka dari 408 SD Negeri di seluruh Kabupaten Bima ada sekitar 490 orang siswa ABK. Selain karena keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus, pejabat Pemerintah Kabupaten Bima menunjukkan antusiasme terhadap gagasan peningkatan kualitas pendidikan, selalu hadir dan terlibat intens dalam diskusi sosialisasi program, serta ajeg memberikan informasi mutakhir terkait penyelenggaraan pendidikan



Selasa, 14 Mei 2019 Tim YAPPIKA-ActionAid dan Uni Eropa bertemu dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., dan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer. YAPPIKA-ActionAid diwakili oleh Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif), Akbar Ali (National Program Coordinator), dan Rohmad Munawir (Policy Advocacy Officer) dan tim Uni Eropa yang diwakili oleh Destriani Nugroho (Programme Manager), Agnieszka Zelaskiewicz (Finance, Contract, Audit).

Adalah Lembaga non-pemerintah Solud yang menjadi mitra lokal untuk pendampingan dan membentuk komunitas pendidikan inklusif ini.

Di Kabupaten Bima program ini telah mendorong terbentuknya 10 komunitas sekolah dasar di 4 kecamatan dengan jumlah anggota 20 orang di tiap-tiap sekolah. Anggota komunitas sekolah ini terdiri kepala sekolah, para guru, penjaga sekolah, komite sekolah, pemerintah desa, orang tua (yang anaknya putus sekolah atau yang memiliki ABK), tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat lokal. Komunitas sekolah berperan sebagai wadah berbagi ilmu, membahas persoalan-persoalan yang dihadapi sekolah sekaligus mengupayakan jalan keluarnya, serta agar bisa berbagi peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sekolah.

Yang telah dilakukan oleh komunitas sekolah adalah menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah secara partisipatif dan membangun komunikasi yang baik dengan media lokal seperti media cetak dan media online. Program ini juga memfasilitasi terbangunnya jaringan tingkat kabupaten dengan melibatkan 20 organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, media, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan akademisi.

• Hasil Pro-InQluEd

Setelah Program Pro-InQluEd dijalankan maka:



- Pihak sekolah yang terdiri dari para guru dan kepala sekolah serta komite sekolah memiliki pemahaman tentang apa itu pendidikan inklusif.



- Guru-guru memiliki pemahaman tentang ciri-ciri ABK dan bagaimana memperlakukan ABK.



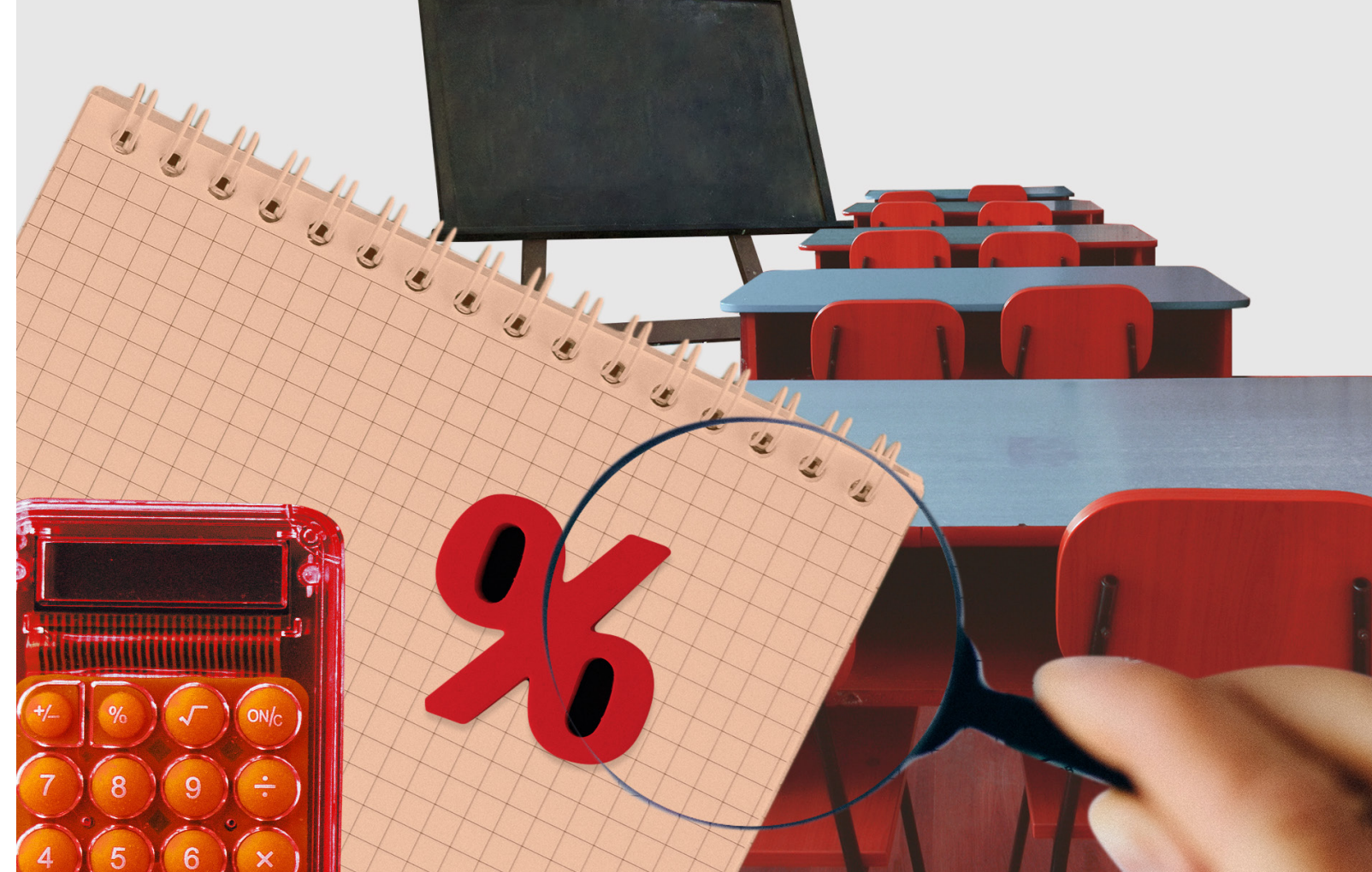
- Anak-anak memiliki pandangan yang positif, bisa menghargai ABK, serta tidak lagi melakukan perundungan, mengejek atau mengolok.



- Komunitas sekolah mendorong Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen mengalokasikan dana, melalui Dinas Pendidikan, untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah agar mampu memperlakukan siswa ABK sebaik-baiknya.



- Adapun hasil advokasi kebijakan untuk program Pro-InQluEd antara lain adalah pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Bima mengalokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk peningkatan kapasitas kepala sekolah mengenai pendidikan inklusif.



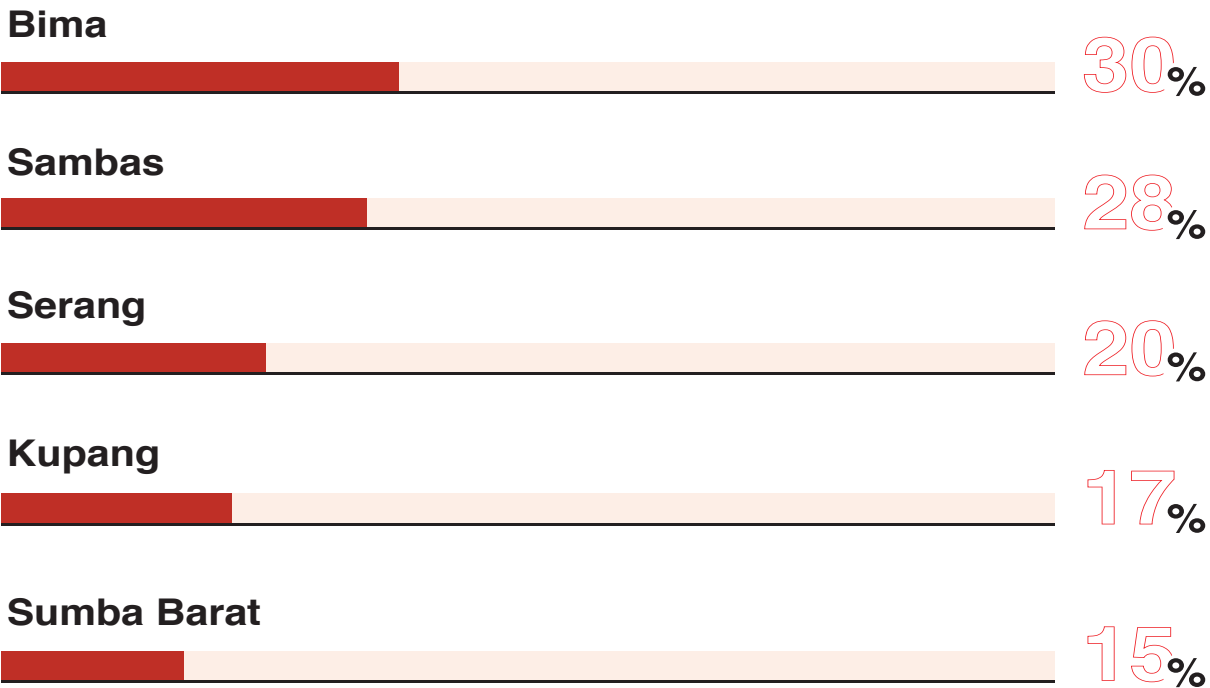
Laporan Analisis Anggaran Pendidikan di Lima Daerah Kerja Yappika-ActionAid Tahun 2019

Alokasi anggaran pendidikan di 5 wilayah kerja YAA, yaitu Kabupaten Bima (NTB), Sambas (Kalimantan Barat), Serang (Banten), Kupang (NTT), dan Sumba Barat (NTT) bervariasi antara 15% hingga 30% dari APBD. Sementara UUD 1945 memandatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/D.

Meskipun alokasi di 5 wilayah kerja sudah mendekati dan bahkan melebihi mandat konstitusi, peruntukan gaji pegawai menjadi porsi terbesar dalam alokasi anggaran tersebut. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Bima mencapai 30%, tetapi 78% peruntukannya adalah untuk gaji pegawai. Demikian halnya dengan Kabupaten Sambas, dimana alokasi mencapai 28%, namun 89% peruntukan untuk gaji pegawai. Artinya, alokasi untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan lainnya porsinya sangat kecil (termasuk untuk renovasi sekolah).

Alokasi anggaran pendidikan di 5 wilayah kerja YAA, yaitu Kabupaten Bima (NTB), Sambas (Kalimantan Barat), Serang (Banten), Kupang (NTT), dan Sumba Barat (NTT) bervariasi antara 15% hingga 30% dari APBD. Sementara UUD 1945 memandatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/D.

Meskipun alokasi di 5 wilayah kerja sudah mendekati dan bahkan melebihi mandat konstitusi, peruntukan gaji pegawai menjadi porsi terbesar dalam alokasi anggaran tersebut. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Bima mencapai 30%, tetapi 78% peruntukannya adalah untuk gaji pegawai. Demikian halnya dengan Kabupaten Sambas, dimana alokasi mencapai 28%, namun 89% peruntukan untuk gaji pegawai. Artinya, alokasi untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan lainnya porsinya sangat kecil (termasuk untuk renovasi sekolah).



Grafik. Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan 2019 dalam APBD di Daerah Kerja YAPPIKA-ActionAid

Jika ditinjau dari kapasitas fiskal daerah, semua daerah ini masih bergantung pada alokasi dana perimbangan (Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK). Dana perimbangan menopang kebutuhan APBD mencapai 70%. Artinya daerah-daerah ini memiliki ruang fiskal yang kecil, karena sebagian besar APBD ditopang oleh dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana pusat yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah dalam skema DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak/NonPajak. Pendapatan (revenue) lokal hampir dapat dikatakan tidak tumbuh sehingga lebih menggunakan dana perimbangan untuk biaya operasional, termasuk gaji pegawai, dan bukan pada program pembangunan.

Salah satu masalah utama di 5 daerah kerja YAPPIKA-ActionAid (YAA), adalah masih banyak ruang kelas dan infrastruktur sekolah yang rusak (lihat tabel), selain siswa putus sekolah dan tidak meratanya jumlah dan kualitas guru. Ketiganya menjadi masalah yang banyak disampaikan dan diungkapkan oleh komunitas sekolah dan jaringan OMS. Masalah infrastruktur sekolah yang rusak atau tidak memadai menjadi hal yang paling banyak disuarakan. Jumlah ruang kelas rusak sedang dan berat mencapai lebih dari 30% di Kabupaten Bima, Kupang, dan Sumba Barat. Sementara di Kabupaten Serang dan Sambas mendekati 20% seperti terlihat pada tabel di bawah.

No.	Kabupaten	Jumlah Ruang Kelas		%
		Total	Rusak (Berat & Sedang)	
1	Serang	5.240	909	17,35%
2	Sambas	3.214	634	19,73%
3	Kupang	2.464	817	33,16 %
4	Bima	2.568	857	33,37%
5	Sumba Barat	929	357	38,43%

Jumlah alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur sekolah di 5 wilayah tersebut tidak besar jika dibandingkan dengan total belanja APBD, yakni berkisar pada 10%. Ini termasuk APBD Murni dan DAK yang diterima oleh kabupaten. Oleh karenanya tidak semua ruang kelas rusak dapat diperbaiki.

Di Kabupaten Bima, misalnya, alokasi APBD (termasuk DAK) hanya dapat menjangkau 87 ruang kelas untuk diperbaiki dari 857 ruang kelas rusak berat dan sedang. Atau hanya sekitar 10% dari sekolah yang harus direnovasi dapat diperbaiki. Artinya, bila keadaan terus seperti ini maka untuk menyelesaikan seluruh ruang kelas rusak di Kabupaten Bima perlu waktu minimal 10 tahun (padahal akan bertambah rusak kondisi bangunan sekolah dan akan bertambah pula jumlah sekolah yang perlu direnovasi).

Jalan penyelesaian perbaikan infrastruktur sekolah. Dalam perencanaan untuk perbaikan ruang kelas, pemerintah daerah perlu mengacu pada data dasar yang telah ada, yakni Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang kemudian diverifikasi ke lokasi untuk penentuan sekolah sasaran program. Hal ini sebagai basis data akurat dalam upaya penyelesaian permasalahan infrastruktur sekolah dan kapasitas fiskal daerah.

Sementara di Kabupaten Kupang, dengan alokasi anggaran yang ada maka perlu waktu 12 tahun dan di Kabupaten Serang memerlukan waktu 8 tahun untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas rusak berat dan sedang.

Pengalokasian APBD dan DAK juga tidak semuanya diarahkan pada perbaikan ruang kelas rusak berat dan sedang. Namun ada pembagian alokasi seperti di Kabupaten Sambas, dimana alokasi APBD Murni hanya untuk perbaikan ruang kelas rusak ringan. Sementara ruang kelas rusak berat dan sedang dana renovasi berasal dari DAK dan DAU (APBN). Selain Sambas, empat kabupaten lain tidak memisahkan pengalokasian tersebut.

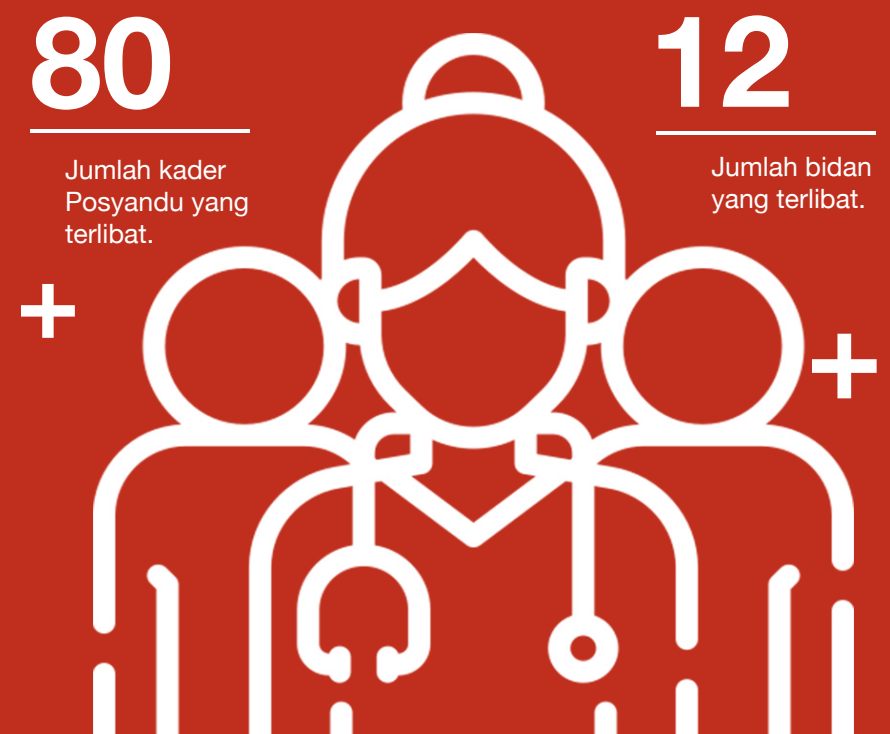
Berdasarkan hasil analisis anggaran tahun 2019, YAA bersama mitra-mitra mendorong pemerintah daerah menyusun sebuah peta dasar yang telah ada, yakni Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang kemudian diverifikasi ke lokasi untuk penentuan sekolah sasaran program. Hal ini sebagai basis data akurat dalam upaya penyelesaian permasalahan infrastruktur sekolah dan kapasitas fiskal daerah.

3. Program Anak Sehat

Satu dari 3 anak Indonesia mengalami stunting.

Stunting adalah kondisi anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami kegagalan pertumbuhan karena malnutrisi kronis, mengakibatkan tinggi badannya lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Angka prevalensi Indonesia adalah 37,2% atau sebanyak **8,4 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting**. Hal ini menempatkan Indonesia di ranking 5 dunia dalam stunting anak (**Riskesdes, 2013**).

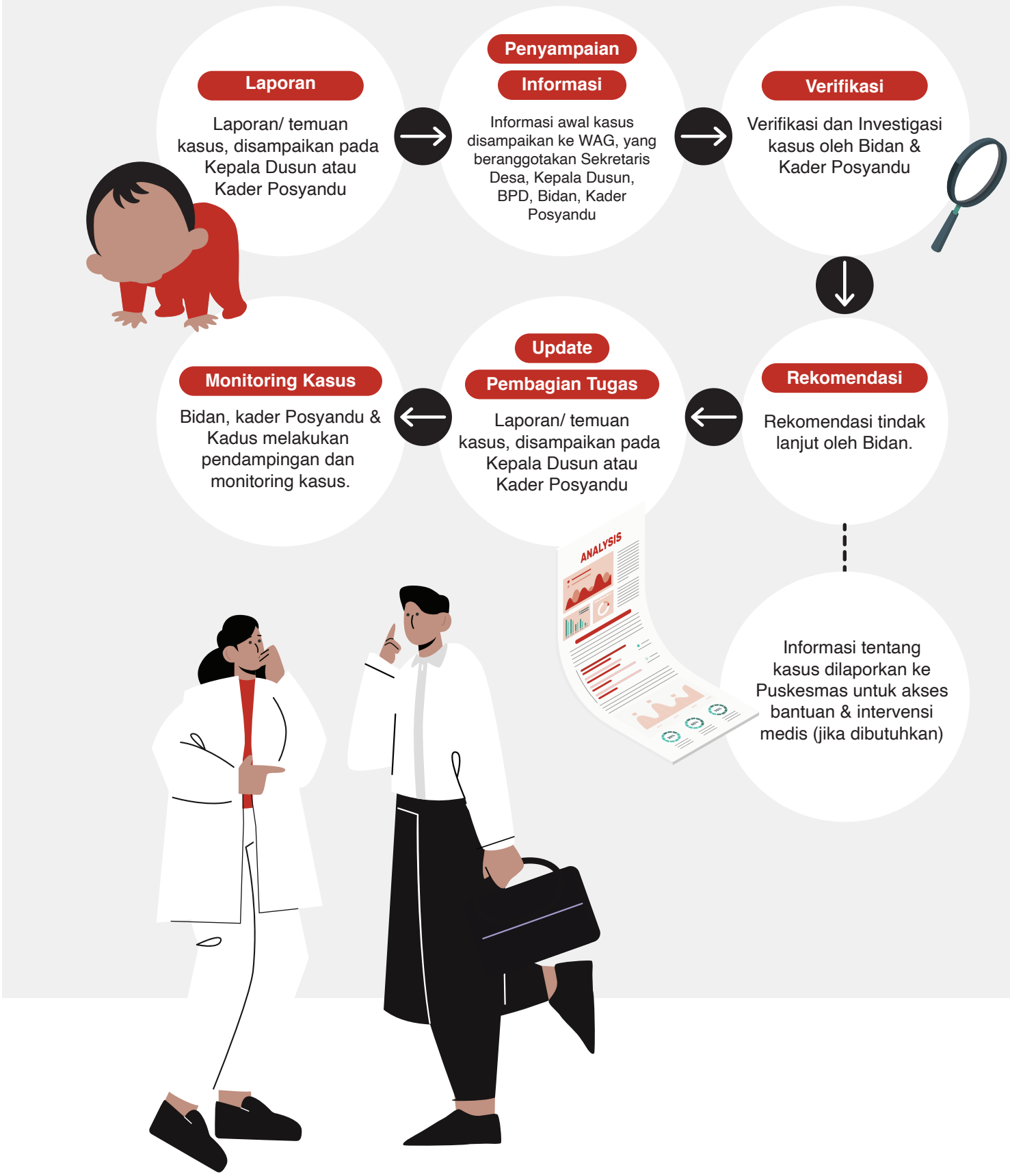
Program #AnakSehat dimulai pada 2018 di Kabupaten Jember. Program ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari donasi publik yang digalang oleh YAA. Melalui program ini, YAA hendak berkontribusi pada terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang berkualitas, akuntabel, tanggap, dan menjamin akses bagi perempuan, anak, dan masyarakat miskin. YAA bersama mitra lokal mengadvokasi pemerintah daerah agar lebih responsif dalam menyelenggarakan pelayanan KIA, termasuk perbaikan gizi dan pengurangan angka stunting.



Mekanisme Deteksi Dini Kasus Stunting dan Gizi Balita di Indonesia

Program Anak Sehat juga menginisiasi mekanisme deteksi dini kasus stunting dan gizi balita di desa. Pencatatan kasus anak stunting dimulai dari tingkat Posyandu. Data diketahui berdasarkan pemantauan kesehatan balita sesuai Kartu Menuju Sehat (KMS) setiap bulan. Salah satu indikator stunting adalah pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai anak sebayanya pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Hal ini ditunjukkan dalam grafik pertumbuhan tinggi badan berbanding usia, dalam KMS, yang berada di garis merah. Data yang terkumpul di tingkat Posyandu seringkali hanya dilaporkan ke Puskesmas dan belum tentu menjadi data desa. Hal inilah yang menyebabkan upaya pencegahan, pemantauan, dan penanganan kurang terintegrasi antara Puskesmas (intervensi medis) dengan desa (intervensi non medis).

Oleh karena itu, Kader Posyandu serta Bidan Desa Sidomulyo, melalui dukungan Program Anak Sehat Yappika-ActionAid menginisiasi mekanisme koordinasi dan pemantauan kasus anak stunting berbasis WhatsApp (WA) group. Dalam mekanisme ini, setiap temuan kasus stunting ditangani secara bersama oleh Bidan dan kader Posyandu serta Kepala Dusun. Setiap tindakan intervensi akan dikomunikasikan dalam WA group sehingga pemerintah desa mempunyai data terbaru tentang penanganan kasus stunting dan dapat digunakan sebagai basis data untuk menyusun perencanaan desa terkait pencegahan stunting. Bagan di bawah adalah mekanisme deteksi dini kasus stunting dan gizi balita di desa.



Pemberdayaan Perempuan

Meningkatkan Dana Kegiatan PMT Melalui Musrenbangdes



Kasus stunting berkorelasi langsung dengan kebedayaan kaum perempuan.

Berdaya adalah bisa mengambil keputusan atas hidup sendiri berdasar pengetahuan dan kapasitas yang memadai. Di Desa Puger Wetan yang berlokasi di pesisir pantai di Kabupaten Jember, kaum perempuan sebelum ini terpinggirkan dari proses-proses pengambilan keputusan -- misalnya dalam Musrenbang desa -- yang masih didominasi oleh laki-laki. Hanya dua orang wakil kaum perempuan -- yaitu ketua PKK dan bidan desa -- dalam musyawarah rencana pembangunan desa yang seharusnya partisipatif itu.

Padahal sektor kesehatan ibu dan anak, seperti stunting misalnya, adalah termasuk masalah perempuan yang seharusnya diikuti oleh kader-kader Posyandu. Kurangnya partisipasi kaum perempuan mengakibatkan persoalan kesehatan ibu dan anak dinilai tidak menjadi prioritas dalam forum Musrenbang Desa.

Maka, tahun 2018 Yappika-ActionAid melakukan intervensi dengan memfasilitasi dibentuknya Pusat Informasi Kesehatan Ibu dan Anak -- yang merupakan bagian

penting dalam Program Anak Sehat di Kabupaten Jember. Pusat informasi ini memiliki mandat membekali kaum perempuan dengan keterampilan kepemimpinan sehingga berani menjadi ujung tombak penyelesaian masalah kesehatan ibu dan anak termasuk dalam hal mencegah terjadinya stunting.

Salah satu kader Posyandu Desa Puger Wetan yang aktif mengikuti agenda Pusat Informasi KIA adalah Rihana (40 tahun). Semula Rihana seringkali merasa malu dan ragu-ragu untuk tampil di ruang publik karena merasa dirinya tidak penting, miskin, tidak berpendidikan, dan hanya istri seorang kuli bangunan. Namun setelah aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan di Pusat Informasi KIA dan Pencegahan Stunting Desa Puger Wetan, Rihana mengalami perubahan signifikan. Rihana jadi memahami bahwa sebagai warga negara ia memiliki seperangkat hak, bisa mengenali hak-haknya itu, serta berani menuntutnya.

Rihana tidak sendirian. Ia aktif bersama anggota Posyandu lainnya, namun Rihana boleh dikatakan yang paling diandalkan karena sifatnya yang ringan tangan. Ia aktif mendorong diskusi pencegahan stunting dalam pertemuan

Semula Rihana seringkali merasa malu dan ragu-ragu untuk tampil di ruang publik karena merasa dirinya tidak penting, miskin, tidak berpendidikan, dan hanya istri seorang kuli bangunan.

desa, dan secara rutin menginformasikan data perkembangan serta hasil kegiatan Program #AnakSehat.

Upaya Rihana dan para kader Posyandu membawa hasil. Kepala Desa Puger Wetan berkomitmen untuk menjamin kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam forum Musrenbang desa tahun 2019. Setidaknya 15 perempuan, yang terdiri dari perwakilan kader Posyandu dan warga, dapat terlibat aktif dalam forum Musrenbangdes untuk mendorong komitmen

Rihana telah menggeser dominasi kepemimpinan laki-laki dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa.

pemerintah desa terhadap masalah-masalah yang dihadapi perempuan warga desa, khususnya kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, dan pemberdayaan perempuan.

Dengan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang desa, maka hasilnya tam-

pak jelas: ada peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu serta pelatihan untuk kader Posyandu. Keberhasilan mendorong isu pencegahan stunting dalam forum Musrenbang desa tersebut berkontribusi pada menguatnya komitmen Pemerintah Kecamatan Puger. Isu pencegahan stunting menjadi program prioritas di setiap desa, yang masuk dalam APB Desa. Rihana telah menggeser dominasi kepemimpinan laki-laki dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Peningkatan pengetahuan dan kesempatan untuk mempraktikkannya, termasuk memberikan kesempatan berdialog langsung dengan para pembuat kebijakan, terbukti telah menguatkan perempuan -- sebagai individu dan kelompok -- untuk mampu membuat keputusan tentang kebutuhan komunitasnya dan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Secara ringkas bisa disimpulkan:

Dengan peningkatan kapasitas, perempuan bisa menjadi pemimpin.



50 Kebun Gizi Keluarga Di Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Desa ini merupakan sentra penghasil kopi terbesar di Kabupaten Jember, dimana hampir 70% wilayahnya merupakan area perkebunan milik PTPN XII, dan terletak di ujung Timur Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.

Dalam hal kesehatan ibu dan anak, Desa Sidomulyo berhasil untuk konsisten menjaga angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada angka nol.

Hal ini dikontribusikan dari kolaborasi aktif antara Bidan Desa, kader Posyandu, serta Karang Taruna dalam penyelenggaraan layanan posyandu, melakukan kunjungan rumah, memberikan asuhan kebidanan, dan kegiatan-kegiatan lain untuk edukasi kesehatan bagi masyarakat. Namun Desa Sidomulyo masih menghadapi satu tantangan terkait kondisi kesehatan ibu dan anak, yaitu cukup tingginya angka stunting dimana terdapat 35 kasus pada balita.

Desa Sidomulyo merupakan daerah subur untuk berbagai jenis tanaman

pangan, sehingga temuan kasus gizi kurang dan bahkan stunting pada balita bagaikan peribahasa tikus mati di lubang padi. Sejak 2018 YAPPIKA-Action-Aid bersama mitra OMS mulai bekerja di Kabupaten Jember dengan fokus pemberdayaan pada kader Posyandu melalui Pusat Informasi Kesehatan Ibu dan Anak. Melalui program YAA, temuan kasus stunting ini didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat. Semenjak itu situasi kesehatan ibu dan anak dan khususnya situasi gizi balita mendapat perhatian lebih serius banyak pihak.

Ibu-ibu kader Posyandu pun berkreasi untuk pencegahan stunting dengan mengembangkan kebun gizi komunitas di halaman Posyandu, setelah melihat kebun gizi percontohan di halaman rumah bidan desa di akhir 2018. Kebun gizi ini bertujuan memampukan warga untuk dapat menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi keluarganya dari hasil sayur dan buah yang ditanam di pekarangan rumah. Namun upaya ini menghadapi tantangan masifnya serbuan makanan instan dan jajanan tidak sehat, serta minimnya pengetahuan warga tentang gizi dan makanan sehat. Kemampuan untuk berkebun juga perlu ditumbuhkan dengan sabar.

Menginjak tahun 2019, kebun gizi komunitas mulai bisa dinikmati. Dalam beberapa kali Pemberian Makanan Tam-

bahan (PMT) pada kegiatan Posyandu telah memanfaatkan hasil kebun gizi komunitas yang dimasak sendiri oleh kader Posyandu. Keberhasilan ini, didukung oleh Kepala Desa Sidomulyo dengan menganjurkan agar setiap rumah tangga menanam sayur dan buah di pekarangannya, untuk pemenuhan gizi harian keluarga, yang disampaikan dalam sebuah pertemuan warga. Seiring dengan menguatnya pemahaman pemerintah desa, bidan dan kader Posyandu, serta warga tentang gizi dan pencegahan stunting, upaya untuk mengajak warga membuat kebun gizi pun bukan lagi pekerjaan yang berat. Hal ini diperlihatkan dengan makin berkem-

bangnya kebun gizi komunitas, yang telah memanfaatkan hasil panen untuk diolah sebagai PMT bagi balita, mampu melakukan pembenihan sendiri, menjual bibit, dan menjadi percontohan bagi bidan di desa sekitar. Serta meluasnya inisiasi kebun gizi keluarga menjadi 50 kebun gizi di tingkat rumah tangga, yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan keluarga.

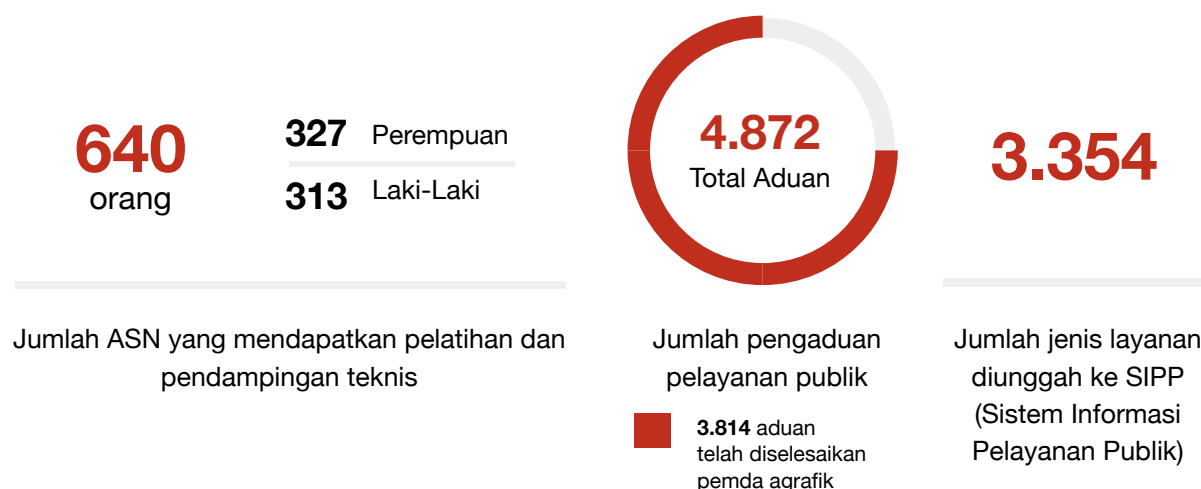


4. Program Penguatan terhadap Aparat Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penggunaan SP4N-LAPOR! dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

Program ini adalah bagian dari Program CEGAH, sebuah program anti korupsi yang didanai oleh USAID. Program ini bertujuan untuk mengurangi korupsi dengan mengatasi akar permasalahannya dan menguatkan kemampuan pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan yang efektif.

Dalam program ini, YAA secara khusus bekerja dalam sektor pelayanan publik melalui penyediaan asistensi kepada pemerintah kabupaten untuk mempromosikan kebijakan berbasis bukti. Melalui program ini, YAA akan berkontribusi dalam mengembangkan kapasitas OMS lokal dalam melakukan monitoring pelayanan publik dan analisis data pengaduan, mengembangkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menangani pengaduan, menyusun kebijakan berbasis bukti, dan menyelenggarakan dialog multistakeholder, serta melakukan kampanye kanal pengaduan SP4N/LAPOR.

CAPAIAN DALAM ANGKA



Mendukung Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam *Penanganan Pengaduan dan Transparansi Informasi Pelayanan Publik*



Melanjutkan kerja sama yang sudah dijalin sejak setahun sebelumnya, pada tahun 2019 YAPPIKA-ActioAid kembali mendapatkan dukungan dari USAID/CEGAH untuk memberikan penguatan terhadap aparat pemerintah daerah dalam optimalisasi penggunaan SP4N-LAPOR! dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

SIPP merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada pengguna.

Bentuk dukungan yang diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan teknis kepada petugas pengelola pengaduan dan SIPP. Pada kerja sama kali ini, YAPPIKA-ActionAid menggandeng **PATTIRO** dan **ANGLOO** sebagai bagian dari satu konsorsium implementasi program. Selain itu, sebagai pelaksana di daerah sejumlah organisasi digandeng sebagai mitra, yaitu GERAH Aceh, PBHK Pontianak, JPIP Palangkaraya, Inisiatif Bandung, PATTIRO Semarang, FITRA Jatim, KOPEL Makassar, PUSPAHAM Kendari, dan Arika Mahina Ambon. Sedangkan pemerintah daerah yang menjadi sasaran kerja sama ini adalah Kota Banda Aceh, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Kendari dan Kota Ambon.

Total sebanyak 534 orang aparat pengelola pengaduan telah dilatih tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan 525 telah dilatih tentang SIPP.

59,8%

peserta pelatihan pengelolaan pengaduan

69,7%

peserta pelatihan SIPP

mengalami peningkatan kapasitas secara signifikan.

Pelatihan pengelolaan pengaduan pelayanan publik difokuskan pada tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu dan pengoperasian SP4N-LAPOR!. Sementara itu untuk pelatihan SIPP, materi difokuskan pada pengenalan tentang SIPP dan bagaimana mengoperasikannya.

Berdasarkan analisis hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa 59,8% peserta pelatihan pengelolaan pengaduan dan 69,7% peserta pelatihan SIPP meningkat kapasitasnya secara signifikan. Sebagai bagian dari komitmen kerja sama dan strategi pengawalan tindak lanjut, sebagian besar pelatihan dihadiri dan diikuti langsung oleh pimpinan daerah seperti Walikota, Sekda, Asisten Daerah, Kepala Dinas, dan Kepala bagian. Paska pelatihan, dilakukan pendampingan teknis kepada staf pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait dengan aspek-aspek teknis penerapan penanganan pengaduan (SP4N-LAPOR!) dan SIPP, serta mengawal agenda-agenda rencana tindak lanjut pelatihan.

Dari kegiatan pelatihan dan proses asistensi teknis SIPP telah meningkatkan kapasitas pemda dalam publikasi standar layanan publik melalui website SIPP sehingga berkontribusi pada menguatnya praktik transparansi informasi layanan publik. Sebelum intervensi program, sebagian besar daerah belum mempublikasikan daftar informasi pelayanan publik. Kalau pun sudah mempublikasi, dengan jumlah yang tidak signifikan. Setelah intervensi program, total sebanyak 3.280 jenis informasi pelayanan publik telah diunggah ke website SIPP. Namun demikian, ada satu kota yaitu Surabaya yang tidak ada satu pun jenis layanan yang diunggah ke website

Selain memberikan pelatihan, YAPPIKA juga memberikan dukungan kampanye (sosialisasi) SIPP ke publik, khususnya di 9 wilayah lokasi program melalui sosial media dan face to face campaign.



Kegiatan Training Pengelolaan Pengaduan dan SIPP di Kota Semarang (Photo Credit: PATTIRO Semarang)

SIPP. Hal ini karena Pemerintah Kota Surabaya menolak untuk melakukan hal tersebut karena mereka sedang mengembangkan sistem serupa yang di kelola secara mandiri.

Kegiatan kampanye ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses informasi di website SIPP. Berdasarkan data dari google analytic, sebanyak 720.250 orang telah mengakses informasi dari website SIPP.

No.	Nama Daerah	Jumlah
		Jenis Layanan Publik yang Diunggah ke Website SIPP
1	Semarang	2020
2	Palangkaraya	130
3	Bandung	122
4	Ambon	60
5	Aceh	252
6	Pontianak	499
7	Makassar	84
8	Kendari	113
9	Surabaya	0
Total		3280

Dampak kedua yang dapat dilihat langsung adalah meningkatnya kinerja sembilan pemerintah daerah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik. Dari jumlah 10.106 pengaduan yang berhasil dikumpulkan dari intervensi langsung program, sebanyak 4.651 pengaduan telah terselesaikan dan 98 dalam proses penyelesaian. Selain itu, berdasarkan hasil analisis data SP4N-LAPOR!, tiga daerah yaitu Surabaya, Makassar, dan Palangkaraya memiliki kinerja yang sangat baik dengan laju tindak lanjut pengaduan tepat waktu di atas 98%. Bandung, Semarang, Surabaya,

dan Kendari memiliki laju tindak lanjut tepat waktu antara 68%-81%. Namun demikian, masih ada dua kota yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Pontianak yang memiliki tingkat laju tindak lanjut tepat waktu di bawah 60%.

Keberhasilan program dalam memberikan dampak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- 1 Dukungan langsung dari Kepala Daerah, khususnya di Kota Semarang dan Palangkaraya. Walikota tidak hanya hadir membuka acara pelatihan, namun menginstruksikan langsung kepada Kepala Dinas untuk berkoordinasi intensif dengan organisasi mitra;
- 2 Adanya keterlibatan jaringan OMS dan kelompok warga dalam mendorong perbaikan pelayanan publik. Tantangan cukup kuat dihadapi di Kota Surabaya karena enggan memberikan komitmen dalam pemanfaatan aplikasi SIPP karena merasa sudah memiliki sistem sendiri yang cukup mapan dan efektif. Kendati demikian, mereka tetap bersedia menyelenggarakan pelatihan, namun enggan melaksanakan rencana tindak lanjut setelah pelatihan.

Prioritas Program 2

Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

YAA bekerja untuk penguatan kapasitas OMS dalam aspek tata kelola internal organisasi dan ketrampilan-ketrampilan teknis, baik melalui program-program YAA sendiri atau kolaborasi dengan institusi lain, seperti program-program donor internasional, lembaga nonpemerintah internasional, dan OMS lokal. Peningkatan kapasitas yang dilakukan YAA fokus pada aspek organisasi seperti orientasi, manajemen keuangan, dan manajemen program serta aspek teknis seperti ketrampilan advokasi, penulisan policy brief, monitoring dan evaluasi kebijakan, dll.

1. Penguatan Kapasitas Mitra-Mitra Program YAA

Penguatan kapasitas mitra program selalu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program-program YAA. Penguatan kapasitas menasar pada kapasitas kelembagaan dan kapasitas teknis dalam advokasi. Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra program dilakukan terintegrasi di dalam program-program yang dikelola bersama dengan mitra.

Sepanjang 2019, YAA mengelola program bagi 20 OMS lokal di 13 provinsi, dimana sumber pendanaan berasal dari lembaga donor internasional, Federasi ActionAid International maupun dari hasil penggalangan dana publik yang dilakukan oleh YAA. Kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan meliputi manajemen program, monitoring dan evaluasi,

standar kemanusiaan inti (Core Humanitarian Standard), kerangka kerja ketangguhan (resilience framework), kebijakan anti pelecehan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual dan perlindungan (SHEA and Safeguarding), gender perspektif dan respon kemanusiaan, dan analisis anggaran pendidikan.

Pemulihan dan perlindungan kelompok rentan tidak terlepas dari komitmen bersama untuk memberikan rasa adil bagi penyintas.

Melalui pengembangan kapasitas yang diberikan oleh Yappika-ActionAid, kami mampu menerapkan salah satu kebijakan kunci di lembaga Sikola Mombine dengan menetapkan focal point SHEA and Safeguarding serta menginternalisasi dan mengedukasi perempuan di tingkat grassroot.

- Risnawati, Direktur Sikola Mombine-

2. Peninjauan Kapasitas dan Kinerja Mitra Program SETAPAK II Menggunakan OCPAT

Penguatan kapasitas mitra program selalu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program-program YAA. Penguatan kapasitas menasar pada kapasitas kelembagaan dan kapasitas teknis dalam advokasi. Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra program dilakukan terintegrasi di dalam program-program yang dikelola bersama dengan mitra.

Sepanjang 2019, YAA mengelola program bagi 20 OMS lokal di 13 provinsi, dimana sumber pendanaan berasal dari lembaga donor internasional, Federasi ActionAid International maupun dari hasil penggalangan dana publik yang dilakukan oleh YAA. Kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan meliputi manajemen program, monitoring dan evaluasi, standar kemanusiaan inti (Core Humanitarian Standard), kerangka kerja ketangguhan (resilience framework), kebijakan anti pelecehan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual dan perlindungan (SHEA and Safeguarding), gender perspektif dan respon kemanusiaan, dan analisis anggaran pendidikan.

Hasil Evaluasi Peserta Peninjauan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Menggunakan OCPAT

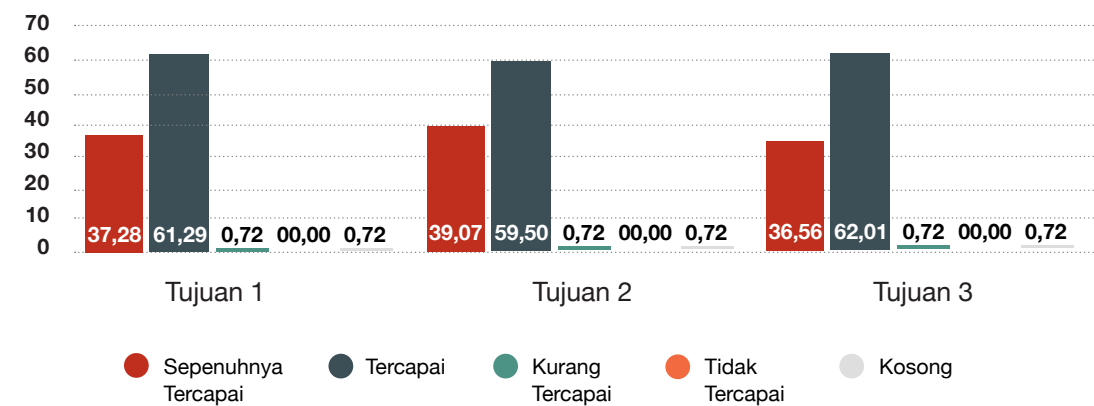
Ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan assessment di 30 organisasi Mitra Program SETAPAK 2, yaitu

- i. mendapatkan data perkembangan kapasitas kelembagaan,
- ii. mendapatkan data kebutuhan penguatan kapasitas mitra, dan
- iii. menghasilkan rekomendasi prioritas bagi The Asia Foundation (TAF) untuk peningkatan kapasitas mitra.

Untuk mengetahui tingkat persepsi peserta terkait dengan pencapaian ketiga tujuan tersebut, Yappika-ActionAid mengadakan evaluasi paska kegiatan assessment. Melalui kuesioner yang dibagikan kepada peserta di akhir kegiatan, berikut adalah gambaran rinci dari penilaian peserta terhadap tingkat capaian tujuan program.

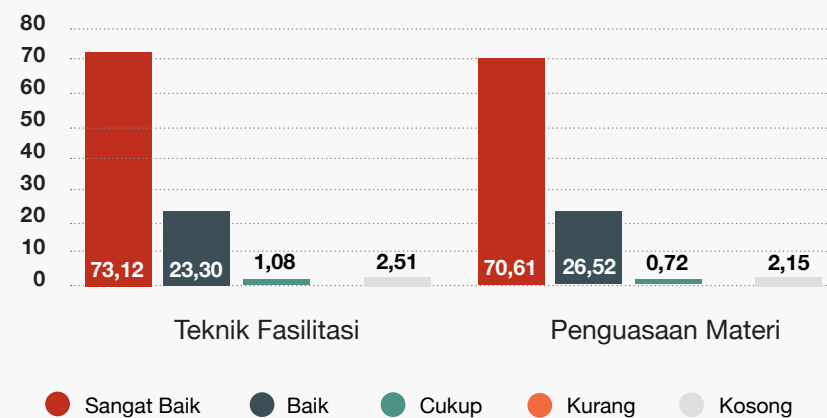
Sebanyak 279 peserta dari 30 organisasi yang mengikuti OCPAT telah memberikan penilaian terhadap pencapaian tiga tujuan kegiatan dan kualitas fasilitator. Hampir seluruh peserta menyatakan bahwa ketiga tujuan sepenuhnya tercapai dan tercapai, seperti diperlihatkan pada tabel di bawah. Artinya kegiatan peninjauan kapasitas organisasi yang difasilitasi oleh Yappika-ActionAid berhasil membantu 30 organisasi ini mengetahui perkembangan kapasitas kelembagaannya, mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas ke depan, dan menghasilkan rekomendasi prioritas bagi TAF.

Penilaian Peserta Terhadap Pencapaian Tujuan Kegiatan Assessment



Peserta juga memberikan evaluasi terhadap kualitas fasilitator, yang difokuskan pada dua aspek, yaitu teknik fasilitasi dan penguasaan materi. Pada penilaian ini hampir seluruh peserta juga sangat baik dan baik dalam dua aspek yang dinilai. Sangat minor peserta yang menilai kualitas fasilitator Yappika-ActionAid pada tingkat cukup dan tidak ada peserta yang menilai kurang.

Penilaian Peserta Terhadap Kinerja Fasilitator



Prioritas Program 3

Advokasi Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil

OMS sejauh ini telah berkontribusi dalam banyak program pembangunan. Bisa dikatakan OMS menjadi mitra pembangunan pemerintah, terutama untuk hal-hal yang tidak terjangkau seperti masyarakat marginal dan minoritas, dan perlunya check and balance melalui advokasi kebijakan pemerintah. Yappika dalam hal ini mencoba berperan agar OMS yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan yang adil dan demokratis tidak ‘terlindas’ oleh kelemahan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi yang makin sulit (tumbuhnya ekstrimisme yang memicu konflik yang meluas). Terlebih bila dengan alasan keamanan pemerintah berhak untuk membubarkan OMS tanpa proses peradilan, yang mengarah pada abuse of power, suatu ruang yang dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu pemerintah juga berhak melakukan hukum pidana atas keanggotaan OMS, yang merupakan langkah mundur bila tidak disertai proses pengadilan.

1. Koalisi Kebebasan Berserikat

Sejak 2010, YAPPIKA menjadi Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). KKB fokus bekerja untuk advokasi perlindungan kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi OMS, monitoring implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berorganisasi, dan memberikan asistensi bagi OMS dalam isu kebebasan berserikat dan berorganisasi. Sifat keanggotaan dalam KKB sangatlah cair. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi kerja advokasi, YAPPIKA bekerja bersama dengan tim inti KKB, yaitu PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), LBH Jakarta, dan IMPARSIAL.

Pada 2019, KKB tetap melakukan pengawasan implementasi UU Ormas dan meluncurkan laporan hasil pengawasan implementasi UU Ormas dan implementasi kebebasan berkumpul dan berorganisasi periode 2018-2019. Laporan pengawasan implementasi UU Ormas merupakan laporan tahun keenam. Sementara laporan pengawasan implementasi kebebasan berkumpul dan berorganisasi merupakan laporan tahun pertama. Advokasi KKB berhasil menyusun draf Peraturan Ombudsman tentang Panduan Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik dan telah disahkan menjadi Peraturan Ombudsman RI No. 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyusun draf Standar Norma dan Petunjuk tentang Hak atas Kebebasan Berumpul dan Berorganisasi dan telah disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No. 5/SP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, serta menyusun Buku Panduan Pemberian Sumber Daya bagi OMS.



YAA Memperkuat Kapasitas Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik bagi Kelompok Keberagaman Gender dan Orang dengan HIV

Tentunya yang kami rasakan sangat terbantu kerja-kerja advokasi dari tim Yappika yang selalu memberikan ruang belajar untuk kami selaku jaringan. Ditambah kesediaan waktunya dalam membantu GWL-INA dari awal proses pembuatan alat monitoring kualitas layanan hingga menjembatani advokasi kebijakan, khususnya membuat ruang-ruang dialog multi-stakeholder. Pengalaman tersebut sangat luar biasa kami rasakan

(Rosidin Marsal Alharbi S.Psi - Monitoring & Evaluation Officer Jaringan Nasional GWL-INA)

Pada tahun 2019, YAPPIKA-ActionAid (YAA) melaksanakan pelatihan pengawasan dan advokasi pelayanan publik sektor kesehatan bagi kelompok keberagaman gender (KKG) dan orang dengan HIV (ODHIV) di DKI Jakarta. Dari pelatihan tersebut, terdapat 19 orang yang mengalami peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) dalam pengawasan dan advokasi pelayanan publik sektor kesehatan yang terdiri atas 2 perempuan, 10 laki-laki, dan 7 transgender. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi modal bagi KKG dan ODHIV

untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengawasan pelayanan publik guna mengurangi praktik-praktik diskriminasi pelayanan publik yang dialami oleh mereka.

Pada pelatihan tersebut, juga terdapat empat rencana tindak lanjut, yaitu

- 1 Adanya rumusan isu advokasi bersama, yaitu permasalahan BPJS bagi KKG dan ODHIV, yang akan dikemas dalam policy brief
- 2 YAA akan memfasilitasi/mengasistensi pengembangan alat monitoring kepada Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA) dan Jaringan Indonesia Positif (JIP)
- 3 YAA akan memfasilitasi/mengasistensi pengolahan data monitoring kepada Yayasan Kaki
- 4 YAA akan memfasilitasi/mengasistensi penyusunan policy brief kepada Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI), GWL-INA, Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya (PPH Atmajaya), dan Ikatan Perempuan Positif Indonesia.

Dari beberapa RTL tersebut, YAA telah berhasil memfasilitasi pengembangan alat monitoring Poli HIV di Puskesmas dan RSUD yang dimiliki oleh GWL-INA. Alat monitoring Poli HIV tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna pelayanan Poli HIV dan mengidentifikasi praktik-praktik diskriminasi pelayanan. Monitoring pun dilakukan di berbagai Puskesmas dan RSUD di DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Tidak hanya itu, YAA juga memfasilitasi pengemasan hasil monitoring sebagai bahan advokasi kebijakan. Pada akhirnya, bahan advokasi tersebut digunakan dan dipaparkan oleh GWL-INA dalam Dialog Multi Pihak Permasalahan Pelayanan Publik Sektor Kesehatan bagi KKG dan ODHIV yang juga difasilitasi oleh YAA.

Selain itu, YAA juga memfasilitasi Lentera Anak Pelangi (LAP) untuk melakukan pelaporan maldministrasi pelayanan farmasi ketersediaan obat antiretroviral (ARV) anak oleh Kementerian Kesehatan ke Ombudsman RI. Fasilitasi yang dimaksud adalah menyusun bahan advokasi, melengkapi bukti-bukti dan dokumen pelengkap, hingga menyusun analisis hukum.

KKB Konsisten Mendorong Pengesahan RUU Perkumpulan

Pada tahun 2019, KKB melanjutkan kerja advokasi yang dilakukan selama ini dalam merespon dinamika operasionalisasi hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia. Kerja advokasi yang dimaksud adalah mendorong usulan RUU Perkumpulan dan RUU Perubahan Kedua UU Ormas untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 - 2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.

Untuk mencapai target advokasi tersebut, KKB melakukan berbagai bentuk kegiatan advokasi, antara lain 1) Audiensi dengan F-PKS yang diterima oleh Mardani Ali Sera, 2) Audiensi dengan F-Nasdem yang diterima oleh Taufik Basari, 3) Audiensi dengan F-PKB yang diterima oleh Yanuar Prihatin, Nihayatul Wafiroh, dan Dipo Nusantara. Hasil dari audiensi tersebut adalah ketiga fraksi akan mendorong kedua RUU yang diusulkan KKB untuk masuk Prolegnas 2020 - 2024, baik diusulkan melalui komisi maupun fraksi. Selain itu, KKB juga melakukan audiensi dengan Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakspedam NU). KKB juga mengirimkan Dokumen Usulan RUU tentang Perkumpulan dalam Prolegnas 2020 - 2024 dan Prioritas 2020 kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui email.

Tak hanya itu, pada 7 November 2019, YAPPIKA-ActionAid sebagai sekretariat KKB melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan Prolegnas 2020 - 2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Pada akhirnya, RUU Perkumpulan dan RUU Perubahan Kedua UU Ormas masuk sebagai RUU Inisiatif DPR RI dalam Prolegnas 2020 - 2024.

YAPPIKA memiliki kontribusi besar dalam advokasi kebebasan berorganisasi di Indonesia, termasuk dalam advokasi kebijakan RUU (UU) Ormas. YAPPIKA berhasil mendudukkan masalah berorganisasi menjadi salah satu masalah HAM yang krusial di Indonesia dan diadvokasi dengan baik.

“

Secara khusus bagi Komnas Ham, kontribusi YAPPIKA dan Koalisi Kebebasan Berserikat dalam penyusunan Standar Norma dan Setting Kebebasan Berorganisasi Berkumpul sangat besar dan signifikan. Semoga ini menjadi kontribusi perlindungan hak berorganisasi bagi siapa pun di Indonesia

Mohammad Choirul Anam

**Komisioner Komnas HAM
Periode 2017**

”



Prioritas Program 4

Aksi Kemanusiaan dan Ketangguhan

Sebagai anggota Federasi ActionAid, Yappika memiliki mandat untuk mengambil setiap kesempatan terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan (bencana, konflik, dan situasi dimana martabat dan kehormatan manusia terancam). Mandat ini telah ditegaskan di dalam Country Strategy Paper periode 2019-2028, yang memuat alasan, hasil yang diharapkan, dan strategi untuk bekerja dalam aksi kemanusiaan dan ketangguhan agar lebih relevan dengan situasi Indonesia sebagai negara yang rawan bencana.

Pendekatan kerja kemanusiaan yang digunakan adalah kepemimpinan perempuan, mendorong pergeseran kekuasaan/kekuatan kepada aktor lokal, dan akuntabilitas kepada komunitas terdampak bencana.

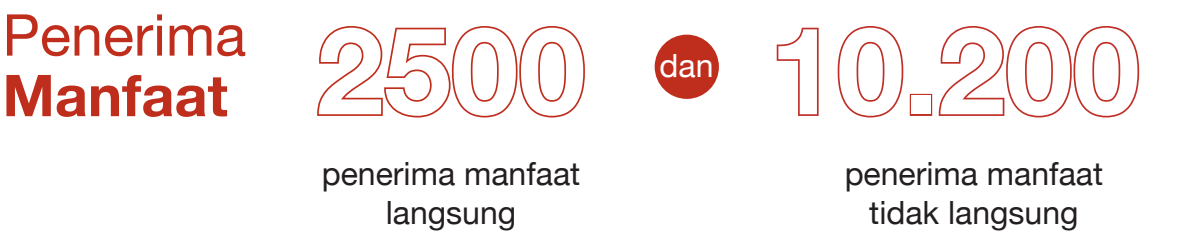
1. Program Emergency Response and Recovery Sulawesi Tengah

Pada 28 September 2018 terjadi bencana gempa, Tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala Sulawesi Tengah. Terdapat 2.081 korban jiwa, 4.400 korban luka, 211.000 orang mengungsi, dan 68.451 rumah hancur. Yappika-ActionAid melakukan tanggap darurat bersama dengan Koalisi Sulawesi Tengah Bergerak dan berlanjut dalam program jangka panjang untuk memberi dukungan bagi pulihnya masyarakat terdampak, khususnya perempuan.

Dalam program ini, Yappika-ActionAid juga bekerja dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional dan internasional bersama dengan Federasi ActionAid International. YAA bekerja sama dengan tiga mitra OMS, yaitu yaitu Sikola Mombine, WALHI Sulawesi Tengah, dan Fatayat NU. Program ini mendapatkan dukungan pendanaan dari DEC (Disaster Emergency Com-

mittee) dan Penny Appeals melalui ActionAid UK, ElectricAid melalui ActionAid Irlandia, DPRF (Disaster Preparedness and Response Fund), dan publik Indonesia.

CAPAIAN DALAM ANGKA



Pelokalan dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Kemanusiaan

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun visibilitas dan pengakuan terbatas dalam upaya respon resmi diantara para aktor yang bekerja di tingkat nasional dan internasional, berbagai perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan adalah beberapa aktor pertama yang memobilisasi dan merespons di lokasi di Sulawesi Tengah. Individu dan organisasi ini memanfaatkan posisi tepercaya mereka dalam komunitas, dan koneksi serta jaringan yang ada, untuk bergerak cepat dan efektif. Mereka mampu menyediakan layanan utama bagi masyarakat, termasuk mendukung proses evakuasi dan distribusi makanan serta pakaian, bertindak sebagai tenaga medis dan mendukung rekonstruksi sekolah. Selain itu, perempuan dan organisasi lokal yang dipimpin perempuan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang spesifik dan beragam di masyarakat. Misalnya, dalam menyiapkan dan mengelola ruang aman (termasuk Ruang Ramah Perempuan dan Tenda Ramah Perempuan), memberikan layanan dan dukungan psikososial, dan menciptakan peluang bagi perempuan dan anak-anak untuk berkumpul dan berbagi pengalaman serta masalah mereka. Mereka juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan profil, dan mengadvokasi mengenai masalah utama dengan otoritas lokal dan lembaga pelaksana.

Terlepas dari contoh-contoh yang tersebar tentang perempuan yang memimpin berbagai kegiatan sebagai bagian dari respons kemanusiaan dan proses pemulihan di Sulawesi Tengah, penelitian ini mengidentifikasi beberapa peluang dan tantangan lintas sektoral untuk pelokalan yang dipimpin perempuan dalam konteks ini:

- 1 Ketidaksetaraan gender yang ada diperburuk dan menjadi kacau setelah bencana Sulawesi Tengah. Hal ini memunculkan risiko dan peluang.
- 2 Struktur pengambilan keputusan dan mekanisme koordinasi resmi untuk respons Sulawesi Tengah terus didominasi oleh laki-laki. Namun, beberapa perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan telah mampu menegaskan pengaruhnya dalam ruang pengambilan keputusan lokal.

- 3 Perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan memiliki beragam keterampilan, pengetahuan, dan jejaring yang merupakan aset besar dalam kesiapsiagaan kemanusiaan, respons, dan kegiatan pemulihan. Namun, kurangnya 'keahlian kemanusiaan' dan tantangan kapasitas operasional membatasi keterlibatan penuh mereka.
- 4 Pemerintah pusat telah memperjuangkan pelokalan dalam respons Sulawesi Tengah. Ada juga 'lingkungan kebijakan yang mendukung' untuk memajukan hak-hak dan perlindungan perempuan. Namun, terdapat kurangnya koneksi antara keduanya, serta operasionalisasi terbatas di tingkat lokal.

Rekomendasi

Belajar dari tanggap bencana Sulawesi Tengah dapat membantu memberikan wawasan yang bermanfaat tentang upaya yang lebih luas dari organisasi lokal yang dipimpin perempuan, dan menyoroti pentingnya investasi jangka panjang dalam kepemimpinan perempuan sebelum, selama dan setelah bencana melanda.

Di bawah ini kami uraikan empat rekomendasi untuk aktor kemanusiaan internasional dan lembaga (manajemen bencana) pemerintah, yang dirinci lebih lanjut dalam laporan:

- 1 Lembaga kemanusiaan dan donor perlu memahami norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang membentuk kehidupan perempuan sebelum, selama dan setelah krisis kemanusiaan dan menunjukkan ini dalam operasional, mulai dari memasukkan analisis feminis dalam asesmen kebutuhan hingga mengenali beban pekerjaan merawat yang tidak dibayar dan dibayar pada partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan.
- 2 Lembaga kemanusiaan dan donor harus memprioritaskan suara, perspektif dan keterampilan perempuan dalam arsitektur kemanusiaan dan ruang pengambilan keputusan serta dalam organisasi mereka sendiri, memastikan partisipasi organisasi

perempuan lokal dalam sistem cluster dan memiliki rencana progresif untuk mencapai kesetaraan gender dan kesetaraan dalam tim kemanusiaan mereka.

- 3 Lembaga-lembaga kemanusiaan dan donor harus memperkuat kapasitas mitra lokal untuk menanggapi skala, langkah dan tuntutan unik dari respons kemanusiaan, tetapi untuk melakukannya dengan cara yang mendukung dan menghubungkan dengan ukuran, aspirasi dan keterampilan yang berharga serta keadilan gender dalam jangka lebih panjang pada organisasi perempuan lokal dan jaringan mereka.
- 4 Pelaku penanggulangan bencana dari pemerintah harus memupuk dialog dan kolaborasi yang efektif antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang beroperasi di tingkat nasional dan lokal, untuk mendukung implementasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam kebijakan dan pedoman kedaruratan ke dalam praktik.

Laporan riset lengkap dapat diunduh di
https://yappika-actionaid.or.id/wp-content/uploads/2020/01/Final-Report_Leading-The-Way_Indo.pdf.

#TanggapDaruratdanPemulihan

Mama Minuk Bangkit dari Trauma Paska Bencana





Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 yang diikuti bencana tsunami, tanah longsor, dan likuifaksi alias tanah jadi lumpur, telah menelan korban 4.204 jiwa (2.830 jiwa meninggal dunia, 701 jiwa tidak ditemukan, 1.016 jiwa terkubur masal). Demikian dahsyat bencana ini sehingga para penyintas – yaitu korban yang selamat -- mengalami trauma paska bencana. Mama Minuk, ibu tiga anak berusia 54 tahun, adalah salah seorang penyintas. Ia berhasil menyelamatkan diri, namun rumahnya dan juga rumah-rumah tetangganya di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi – yang ternyata merupakan bagian dari daerah rawan bencana -- hancur-lebur diguncang gempa.

Merasa cemas jangan-jangan akan ada bencana susulan, merasa sedih karena harta-bendanya ludes dan rumahnya tinggal puing-puing, ia mengalami trauma paska bencana. Ia tidak sendirian, banyak penyintas yang lain pun mengalami trauma yang mirip.

Paska bencana, ia tinggal di gubuk penampungan sementara bersama keluarganya di dekat bukit agak menjauh dari lokasi bencana. Di Desa Rogo itu Yappika-ActionAid bermitra dengan Walhi Sulteng memberikan pendampingan bagi para penyintas menghadapi masa-masa sulit paska bencana.

“Tinggal di tempat penampungan sementara adalah salah satu saat tersulit dalam hidup saya sejauh ini,” katanya. “Bergabung dengan kelompok tani dan berkebun bersama perempuan lain membuat saya bahagia. Kami dapat berbagi cerita, dan ini membantu mengurangi trauma saya,” ujarnya tentang pendampingan yang dilakukan oleh Yappika-ActionAid dan Walhi Sulteng. Mama Minuk berbicara banyak tentang pentingnya bekerja bersama dan saling mendukung. Termasuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman, sebagai bagian dari proses pemulihan dari trauma.

Kegiatan yang diikuti oleh Mama Minuk adalah bercocok-tanam dan mengikuti kelas perlindungan bagi perempuan.

Kegiatan bercocok-tanam yang diikuti para perempuan Desa Rogo ini merupakan bagian dari sektor perlindungan Program Tanggap Darurat dan Pemulihan (ERR/Emergency Response and Recovery). Mama Minuk bersama perempuan lain meminta ada kegiatan yang dapat mengalihkan ingatan dari trauma bencana. Mereka terlibat dalam menanam jagung bersama sekitar 75 orang lainnya, baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan pada fase II, ia turut aktif menanam sayur-mayur, yang pada awalnya ditanam di demplot dan kemudian dipindah ke pekarangan rumah, karena kendala kurangnya ketersediaan air.

Dalam kelas-kelas yang diikutinya Mama Minuk telah berpartisipasi secara aktif. Ia bahkan mengkoordinasi dan mengundang perempuan untuk aktif dalam kegiatan kelompok, termasuk menanam kembali. Ia telah berkontribusi secara signifikan, dalam hal membangun solidaritas diantara sesama perempuan dan di bidang mata pencaharian perempuan.

Dalam kelas perlindungan yang diikutinya, Mama Minuk memperoleh materi tentang hak perempuan, khususnya perempuan penyintas bencana. Pengurangan resiko bencana (PRB), dan kekerasan berbasis gender. Sedangkan kegiatan bersama yang pernah dilakukan adalah pembuatan peta kerentanan desa (potensi bencana) dan identifikasi permasalahan perlindungan perempuan paska bencana seperti akses air bersih, pemba-

gian bantuan jaminan hidup dan dana stimulan, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil dari mengikuti berbagai kegiatan tersebut, seperti halnya para perempuan lain di desanya, Mama Minuk mampu mengidentifikasi kebutuhan perempuan di komunitasnya, dan makin berani menyatakan pendapat. Mama Minuk bersama beberapa perempuan lainnya berhasil melakukan aksi bersama, berupa audiensi dengan kepala desa, untuk mempertanyakan kepastian distribusi bantuan hunian tetap, dan bantuan dana sosial bagi penyintas bencana.



2. Program Perlindungan Berbasis Komunitas yang Dipimpin Perempuan (Women-led Community Based Protection)

Setelah gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah, pada 22 Desember 2018 gempa dan Tsunami terjadi di Selat Sunda. Terdapat 429 korban jiwa, 154 orang hilang, 1.485 korban luka, 16.082 orang mengungsi, dan 882 rumah hancur. YAA bersama dengan PATTIRO Banten melakukan tanggap darurat hingga kuartar pertama 2019, kemudian berlanjut dalam program satu tahun untuk memberi dukungan bagi pulihnya masyarakat terdampak, khususnya perempuan.

YAA melaksanakan program ini bersama PATTIRO Banten dan PATTIRO Serang di Pandeglang dan Serang. Kegiatan tanggap darurat fokus untuk distribusi paket makanan untuk dewasa dan balita, paket nonmakanan khusus untuk bayi dan perempuan, serta dilakukan assessment sebagai basis untuk intervensi program lanjutan. Program bantuan di Pandeglang dan Serang selama satu tahun di lokasi bertujuan untuk:

- 1 menguatkan perempuan yang terkena dampak bencana melalui ruang aman, pusat informasi kolektif berbasis lokal, serta dukungan usaha kecil
- 2 menguatkan kapasitas mitra lapangan untuk menjalankan kerangka kerja perlindungan berbasis komunitas yang dipimpin perempuan
- 3 meningkatkan kesadaran dan kapasitas komunitas sekolah, terutama perempuan dan anak-anak, dalam upaya pengurangan resiko bencana

CAPAIAN DALAM ANGKA

Penerima Manfaat 510 penerima manfaat langsung dan 2040 penerima manfaat tidak langsung

2 Women Friendly Space → 180 Perempuan mengakses layanan WFS
→ 100 Perempuan mendapatkan penguatan kapasitas

2 Women Focal Point

6 Kelompok Ekonomi → 230 anggota orang

Ibu Ratnawati Sang Penjaga dari Kampung Paniis



Sosok Ibu Ratnawati

Tidak pernah terpikirkan, akan ada bencana tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu – yang meluluhlantakkan daerah Ujung Kulon, Jawa Barat. Gedung SDN 2 Tamanjaya, di Desa Tamanjaya, yang terletak hanya 30 meter dari garis pantai, menjadi salah satu bangunan yang dihantam tsunami.

Ratnawati, biasa dipanggil Ibu Wati oleh siswanya di SDN Tamanjaya, ikut mengungsi dengan para tetangganya ke dataran tinggi di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

“Duh Tuhan, semoga Engkau selamatkan anak-anak”

dalam hati Ibu Wati berdoa. Sebagai seorang berpendidikan lulusan Strata 1 dari Universitas Negeri Tirtayasa, dia paham benar apa itu bencana tsunami dan dampaknya.

Pagi hari 23 Desember 2018, Ibu Wati bersama dewan guru mengunjungi sekolah mereka. Hati mereka ikut hancur mendapati hancur-leburnya bangunan sekolah. Puing berserakan. Bongkahan batu di halaman sekolah, atap genteng hancur, dan pagar pengaman sudah rata dengan tanah.

SDN 2 Tamanjaya memang tepat berada di lokasi terdampak tsunami terparah di Desa Tamanjaya.

Sebagai seorang guru, Ibu Wati berpikir apa yang harus dilakukan kini? Bagaimana anak-anak akan sekolah, kalau bangunan seperti ini? Namun Ibu Wati merasa itu bukanlah hal yang perlu dipikirkan saat ini. Hal lebih penting, bagaimana sekolah segera mengetahui keberadaan anak-anak, dan menyelamatkan dokumen pembelajaran anak-anak.

Lantas upaya pembersihan bangunan sekolah dilakukan oleh segenap guru. Beberapa dokumen penting anak-anak, berhasil diselamatkan seperti rapor, buku tabungan siswa, serta buku pelajaran anak-anak. Pencarian keberadaan para siswa juga dilakukan, dan para guru bersyukur tidak ada siswa yang menjadi korban.

Hari kedua pasca tsunami, akses ke Desa Tamanjaya mulai terbuka. Beberapa relawan datang. SDN Tamanjaya menjadi titik kumpul bagi relawan, dan cerita tentang Ibu Ratnawati bermula dari sini.

Bersama tiga guru lain, yaitu Ibu Ade Rostini, Ibu Asnimah, dan Ibu Imas Masiah, Ibu Wati bahu-membahu mengelola pembagian bantuan bagi para korban melalui pos bantuan di sekolah mereka. Para siswa tercukupi kebutuhan peralatan sekolah dari sumbangan berbagai donatur.

Sebagai bendahara sekolah, Ibu Wati berperan amat krusial. Paska bencana, setiap hari dia menghabiskan waktu di sekolah untuk mendata siswa terdampak. Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan. Membagikan bantuan sampai ke tangan anak-anak.

Secara bersamaan, Ibu Wati juga membantu mengkoordinasikan pembuatan sekolah darurat yang dikelola relawan. Tugas yang sangat melelahkan, tetapi terus dijalani tanpa menyadari bahwa dirinya juga korban. Trauma terhadap suara ombak, yang seperti ledakan, terus mengiang setiap malam. Tetapi Ibu Wati tetap ke sekolah keesokan harinya, untuk menjalankan tugasnya.

Delapan bulan berlalu. Bangunan baru sekolah telah berdiri. Pada September 2019, Ibu Wati dan dewan guru bertemu dengan Yappika-ActionAid dan Pattiro Banten dan Pattiro Serang. Hari itu menjadi titik baru yang mempertemukan rencana Yappika-ActionAid dengan cita-cita Ibu Wati dalam Program Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Berbasis Komunitas, yaitu suatu program untuk meningkatkan kapasitas sekolah guna mengurangi dampak dari bencana, khususnya gempa dan tsunami.



Tsunami bisa datang lagi kapan saja. Itu menjadi pemikiran yang sangat mengganggu Ibu Wati. Dia ingin agar edukasi tentang kesiapsiagaan bencana bisa menjadi pembelajaran yang efektif bagi siswa di sekolah.

Dari diskusi bersama pendamping komunitas (community organizer) mitra Yappika-ActionAid, dipahami banyak dan luasnya pemangku kepentingan yang berperan dalam proses edukasi anak. Target edukasi anak tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu atau dua aktor saja. Berdasarkan pengalaman guru dan warga, gedung sekolah baru tidak akan terbangun tanpa keterlibatan banyak pihak, terutama partisipasi warga setempat.

Dari situlah lahir Komunitas Kasabbar (Komunitas Sekolah Aman Bencana Berbasis Rakyat) di SDN 2 Tamanjaya. PRB Berbasis Komunitas Yappika-ActionAid menjadi kegiatan sehari-hari bersama dewan guru dan warga demi mengedukasi siswa sebagai target utama serta orang tua siswa agar dapat pula memahami gerakan #SekolahAman.

Komunitas Kasabbar aktif mengikuti kegiatan pelatihan pengurangan resiko bencana. Seperti identifikasi potensi bencana, membuat peta jalur evakuasi, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul, serta membuat jalur jalan siswa dari perkampungan ke sekolah menembus hutan di dalam wilayah TNUK.

Bagi Ibu Wati, terlibat dalam kegiatan Yappika-ActionAid sangatlah menarik. Pembelajaran yang dilakukan secara partisipatif dalam menggali pengetahuan dan kebiasaan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana, membuat peserta merasa diakui. Selain memperjelas hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar sekolah, proses ini memperkuat interaksi antara guru dan orang tua siswa, khususnya mengenai kebencanaan.

Para orang tua mengakui bahwa pengetahuan anak-anak di sekolah dapat diterapkan oleh semua anggota keluarga saat terjadi bencana di rumah. Temuan permasalahan tersebut ditanggapi komunitas dengan menjadwalkan pelatihan bagi orangtua siswa dan warga di tiga kampung sekitar SDN 2 Tamanjaya, yaitu Kampung Ciburuluk dan Pasirjaya Desa Cigorondong, dan Kampung Paniis Desa Tamanjaya.

Dalam pelatihan pengurangan resiko bencana ini, ibu-ibu anggota komunitas menjadi tutor untuk memberikan materi pengurangan resiko bencana bagi para orang tua. Materi yang sama dengan yang dipelajari para siswa.

B | Laporan Penggalaan Dana

Organisasi masyarakat sipil (OMS) menghadapi tantangan dalam menggala dana yang cukup untuk mendukung keberlangsungan organisasinya agar mampu mewujudkan visi dan misi perubahan sosial. Namun di sisi lain, minat masyarakat Indonesia untuk berdonasi cukup tinggi sedangkan sumber pendanaan selain donor masih tersedia cukup beragam di Tanah Air. Organisasi filantropi lokal juga tumbuh dan berpotensi memberikan dukungan kepada OMS. Jumlah individu berpenghasilan tinggi (HNWI) juga telah tumbuh secara signifikan –di mana para analis memperkirakan hal ini akan terus berlanjut-- melalui pembentukan organisasi filantropi keluarga. Perusahaan juga berpotensi memberikan dukungan kepada sektor masyarakat sipil meskipun hingga saat ini kontribusi mereka hanya mendukung sebagian dari seluruh anggaran OMS.

YAA melanjutkan perjalanannya dalam memperkuat aliran pendanaan dari berbagai sumber melalui berbagai saluran filantropi dan penggalan dana kemitraan, lebih banyak berinovasi di saluran digital, berkolaborasi dengan OMS regional dan keluarga ActionAid, serta mengejar sumber pendanaan dari donor institusi.

CAPAIAN DALAM ANGKA



> 9.100

Total **donor individu**

3.546 donor reguler baru

Total Income

> Rp13,7 Miliar

dari donor individu

> Rp 2 Miliar

dari HNWI

> Rp 750 Juta

others (service provider, dll)

Total Dana

> Rp 9,1 Miliar

program dari donor institusi

> Rp 16,4 Miliar

untuk humanitarian action

Keberhasilan

YAPPIKA-ActionAid

*bukan pada berapa besar dana publik yang berhasil dikumpulkan, tapi pada **kebajikan sosial yang berhasil ditransformasikan untuk pelayanan publik yang semakin baik.***



Ahmad Alamsyah Saragih

Anggota Ombudsman RI
Periode 2016-2021



Rostinah

adalah salah satu donatur regular YAPPIKA-ActionAid yang sejak 2016 hingga saat ini.

Saya menyisihkan sebagai rejekinya untuk di tempat yang layak, walaupun donasinya dengan nominal yang tidak banyak. Saya berharap semoga program YAPPIKA-ActionAid tetap berjalan, jangan pernah berhenti. Semoga teman-teman tetap sehat.



Galih Panuntun

adalah salah satu donatur regular YAPPIKA-ActionAid yang sejak 2016 hingga saat ini.

Saya menyisihkan sebagai rejekinya untuk membantu anak-anak agar dapat bersekolah di tempat yang layak, walaupun donasinya dengan nominal yang tidak banyak. Saya berharap semoga program YAPPIKA-ActionAid tetap berjalan, jangan pernah berhenti. Semoga teman-teman tetap sehat.



C | Tata Kelola Lembaga dan Reputasi

Yappika memperoleh persetujuan resmi sebagai anggota Federasi ActionAid International setelah melalui proses penilaian Membership Development Plan (MDP) yang meliputi beberapa aspek organisasi, yaitu orientasi organisasi; kesehatan organisasi dalam hal pemenuhan aspek hukum, standar tata kelola, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pendanaan serta keterlibatan masyarakat. YAA terus memprioritaskan penguatan tata kelola organisasi dengan ambisi meningkat keanggotaan dalam Federasi ActionAid International pada lima tahun ke depan.

Yappika akan menyelaraskan dan memenuhi berbagai standar dan kebijakan organisasi sesuai dengan Federasi ActionAid International, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum Indonesia. Integritas dan akuntabilitas organisasi akan menjadi prioritas, dengan melaksanakan audit keuangan oleh kantor akuntan publik terpercaya, audit internal, penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada seluruh donatur (individu, perusahaan dan lembaga) serta masyarakat dan pemerintah melalui media konvensional dan digital, dan menerbitkan laporan setiap tahun.

Rencana Strategis YAPPIKA-ActionAid (Country Strategy Paper) 2019-2028

Mulai 2019, YAPPIKA-ActionAid (YAA) menjalankan strategi baru, yaitu **“Memberdayakan Rakyat, untuk Keadilan Sosial dan Pendalaman Demokrasi”**. Country Strategy Paper ini merupakan penyesuaian YAPPIKA sebagai anggota Federasi ActionAid International terhadap perubahan konteks internal dan eksternal dalam lingkup nasional maupun internasional. Berikut ini pokok-pokok dari Rencana Strategis ini.

Relevansi

Ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi terjadi karena relasi kuasa dan akses pada sumber daya yang tidak setara, sehingga mereka yang miskin dan rentan tidak bisa hidup secara setara, independen, dan bermartabat di dalam masyarakat. Ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi terjadi mulai dari tingkat keluarga, komunitas/masyarakat, negara, pasar baik nasional maupun internasional. Ketidaksetaraan gender terjadi pula pada berbagai level tersebut, sehingga perempuan, terutama yang miskin (bersama anak-anak, disabilitas, dan minoritas lainnya) diabaikan hak sebagai warga negara dan berbagai kegiatan pembangunan.

YAA percaya bahwa keadilan, kesetaraan, dan promosi demokrasi hanya dapat dicapai dengan mengubah relasi kuasa yang tidak adil dan memastikan akuntabilitas pemerintah untuk menciptakan sistem yang adil bagi semua warga, termasuk kelompok marjinal dan rentan. Kami juga percaya bahwa transformasi sosial akan efektif jika dipimpin oleh mereka yang pernah mengalami ketidakadilan, dengan didukung secara langsung oleh gerakan-gerakan sosial sebagai pendorong perubahan di semua level. Oleh karena itu, kami terus memberdayakan komunitas marjinal dan

rentan melalui pengorganisasian untuk membangun kekuatan kolektif rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya.

HRBA (Human Rights Based Approach) dengan prinsip empowerment, solidarity, campaigning dan alternatives akan memandu seluruh pelaksanaan program.

Prinsip GRPS (Gender Responsive Public Service) akan menguatkan program kita untuk mendorong akuntabilitas pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan 4 pilar GRPS, kita akan mengadvokasi anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik inklusif dengan

memastikan akuntabilitas pemerintah. Pada saat yang sama, kita terus menguatkan OMS sehingga mereka mampu menjalankan peran-perannya secara efektif sebagai agen perubahan, sambil terus menguatkan jaringan dan solidaritas gerakan sosial di berbagai level untuk mendukung perubahan dan memperluas dampaknya. YAA juga menguatkan pembelajaran dan menawarkan solusi-solusi alternatif berdasarkan kesuksesan kita di lapangan di mana para pembuat kebijakan bisa menggunakannya untuk mengatasi ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi.

Kerangka Program

Tujuan umum program

Berkontribusi pada terpenuhinya hak-hak rakyat dan terbangunnya kewargaan yang aktif (active citizenship), melalui promosi hak-hak rakyat, mendorong pelayanan publik berkualitas yang inklusif dan responsif gender, pengorganisasian rakyat, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil.



PRIORITAS PROGRAM 1

GRIPS
Gender Responsive and Inclusive Public Service



PRIORITAS PROGRAM 2

CSOCS
CSO Capacity Strengthening



PRIORITAS PROGRAM 3

CSA
Civic Space Advocacy



PRIORITAS PROGRAM 4

HAR
Humanitarian Action and Resilience

Prioritas 1

Gender Responsive and Inclusive Public Service

Memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar pelayanan publik bagi kelompok rentan dan marginal dengan mendorong pendekatan hak asasi manusia (human rights based approach) dan mengembangkan pelayanan publik berkualitas yang responsif gender dan inklusif.

HASIL YANG DIHARAPKAN

- 100 sekolah yang menjadi target advokasi “Sekolah Aman” menjadi percontohan sekolah inklusif, di mana kelompok guru dan komite sekolah aktif menyelesaikan isu-isu pendidikan di sekolah mereka.
- Terbangunnya sistem deteksi dini “stunting” yang melibatkan warga dan pemerintah di 20 kabupaten/kota wilayah target advokasi “Anak Sehat”, di mana Sekolah Dasar juga menjadi salah satu pusat intervensi untuk mengatasi persoalan gizi anak.
- Pelayanan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan adminduk di kabupaten/kota wilayah kerja YAA mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan karena menyandang disabilitas, agama/keyakinan, dan gender/seksualitas.
- Promosi partisipasi aktif kelompok perempuan dan kepemimpinan perempuan di lokasi kerja YAA (orang tua murid, tokoh lokal, kader, sekolah, unit kesehatan) untuk mengadvokasi penyediaan pelayanan dasar.

Prioritas 2

CSO Capacity Strengthening

Menguatkan kapabilitas organisasi masyarakat sipil untuk membangun kemandirian, kewarganegaraan (active citizenship), dan kebajikan publik.

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Meningkatnya kesadaran OMS di 50 kabupaten/kota untuk melakukan pembenahan tata kelola organisasi.
- Menguatnya kemampuan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik dan melayani konstituennya di 50 kabupaten/kota.
- Menumbuhkan organisasi sumber daya di tingkat lokal, setidaknya di 5 lokasi.

Prioritas 3

Civic Space Advocacy

Memperjuangkan lingkungan pendukung yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya masyarakat sipil yang sehat untuk dapat menjalankan peran-perannya.

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Memformulasikan dan melaksanakan kerangka hukum yang melindungi keberadaan masyarakat sipil.
- Kerangka hukum tersebut meliputi:
 - Kebebasan berorganisasi dan berkumpul.
 - Kebebasan sipil lainnya, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan atas informasi, dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
 - Pemenuhan hak pelayanan publik bagi kelompok minoritas sebagai batu loncatan advokasi atas

pengakuan eksistensi, khususnya kebebasan sipil mereka.

- Tumbuh dan menguatnya toleransi di kalangan anak muda terhadap keberagaman Indonesia.

Prioritas 4

Humanitarian Action and Resilience

Membangun ketangguhan komunitas masyarakat yang rentan terhadap bencana dan memastikan keselamatan dan keamanan perempuan, remaja perempuan dan kelompok rentan.

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Komunitas menjadi lebih tangguh terhadap bencana alam dan bencana karena perbuatan manusia dan mampu mengatasi secara efektif dampak-dampaknya.
- Program perlindungan berbasis komunitas yang dipimpin perempuan terintegrasi dalam struktur komunitas.
- Rencana-rencana kesiapan kebencanaan komunitas tersedia dan berjalan.
- Komunitas-komunitas dapat melakukan kampanye dan advokasi untuk memitigasi resiko-resiko bencana.
- Mempengaruhi kebijakan-kebijakan manajemen kebencanaan nasional melalui penelitian dan bukti-bukti dari pertautan/ partisipasi masyarakat.

Prioritas Perubahan Organisasi

1. **Penggalangan sumber daya yang berkelanjutan dari beragam sumber** serta mengembangkan sumber daya manusia yang terpercaya, untuk membangun gerakan sosial yang berkelanjutan

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Komunitas menjadi lebih tangguh terhadap bencana alam dan bencana karena perbuatan manusia dan mampu mengatasi secara efektif dampak-dampaknya.
- Program perlindungan berbasis komunitas yang dipimpin perempuan terintegrasi dalam struktur komunitas.
- Rencana-rencana kesiapan kebencanaan komunitas tersedia dan berjalan.
- Komunitas-komunitas dapat melakukan kampanye dan advokasi untuk memitigasi resiko-resiko bencana.
- Mempengaruhi kebijakan-kebijakan manajemen kebencanaan nasional melalui penelitian dan bukti-bukti dari pertautan/ partisipasi masyarakat.

2. **Pengembangan pengetahuan dan** untuk penguatan demokrasi dan hak asasi manusia.

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Mengembangkan struktur organisasi yang lengkap dan stabil, SDM yang kompeten.
- Mengembangkan sistem manajemen berbasis kinerja.

- Menumbuhkan motivasi dan perilaku pembelajaran berkelanjutan.
- Mengadopsi dan melaksanakan mekanisme AA, yaitu MEL Framework, planning & reporting, MTOC.
- Memproduksi dan mempublikasikan pengetahuan organisasi secara rutin.

3. Melanjutkan **penguatan tata kelola YAA dalam transformasi menuju anggota Afilliate** Federasi AAI, serta memiliki sumber daya manusia yang berkomitmen dan profesional

HASIL YANG DIHARAPKAN

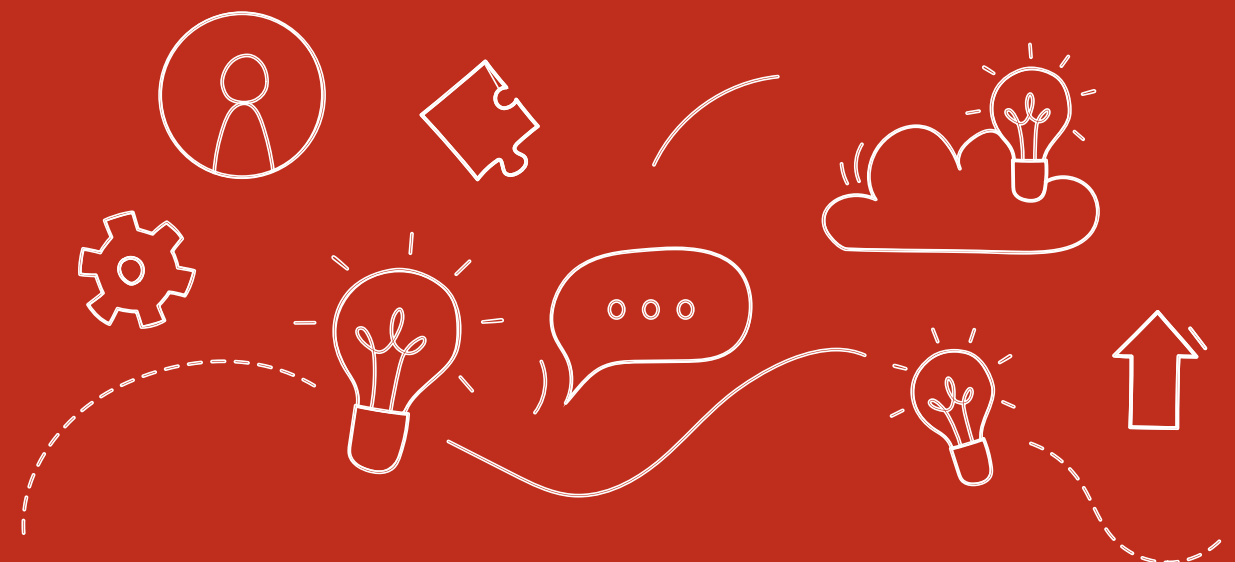
- Menjadi anggota Affiliate AAI.
- Mengembangkan tata kelola organisasi yang kuat bagi kepemimpinan strategis YAA.
- Berkontribusi pada inisiatif regional dan internasional (dual citizenship).
- Menyesuaikan sistem dan proses YAA dengan AAI.
- Memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas kepada donor dan publik.

Kelompok Sasaran

- Anak-anak dari keluarga miskin dan/atau daerah tertinggal.
- Anak-anak dari kelompok rentan/penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama/kepercayaan, etnis, dan gender/seksual.
- Warga (P/L) dari keluarga miskin dan/atau daerah tertinggal, penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama, etnis, dan gender/seksual.
- Komunitas anak muda.
- Perempuan, remaja perempuan, dan kelompok-kelompok rentan yang berada dalam resiko berbagai bencana, dan komunitas yang rentan terhadap beragam bencana.

Dengan Siapa Kami Bekerja

- Mitra OMS di tingkat lokal dan nasional.
- Advokasi bersama koalisi OMS untuk pelayanan publik, kelompok kader, komunitas sekolah, jaringan OMS, KKB, L/OBH.
- OMS sumber daya di tingkat nasional dan lokal.
- Pemimpin dan perwakilan organisasi berbasis agama.
- Unit-unit pelayanan publik, pemerintah daerah dan pusat, DPR/D
- Lembaga-lembaga kuasi negara.
- Lembaga dan program donor.
- Institusi sumber daya lain.



SHEA and Safeguarding Training untuk Staf YAPPIKA-ActionAid

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, dan kepada siapa saja: perempuan, pria, tua, muda, di tempat privat, bahkan di kantor sekalipun. YAPPIKA-ActionAid berkomitmen untuk mencegah dan merespon aneka bentuk pelecehan, eksploitasi dan kekerasan seksual apa pun, termasuk kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap orang dewasa berisiko, baik yang dilakukan oleh staf atau yang muncul dari pelaksana program di lapangan.

Sebagai anggota dari Federasi ActionAid International, YAPPIKA-ActionAid mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan SHEA (Sexual Harrasment, Exploitation, dan Abuse) and Safeguarding (Ind. Pelecehan, eksploitasi, kekerasan seksual dan perlindungan) dan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pada 20 Agustus 2019, Ruby Moshenska, Lead SHEA and Safeguarding ActionAid International, mengadakan pelatihan SHEA and Safeguarding untuk seluruh staf YAPPIKA-ActionAid. Setelah itu, Ruby bersama dengan Hendrik Rosdinar (Program Manager YAA/ SHEA and Safeguarding focal point yang baru ditunjuk) melanjutkan pelatihan yang sama bagi mitra-mitra Program Emergency Response and Recovery (ERR) Sulawesi Tengah.

Dalam pelatihan ini, YAPPIKA-ActionAid dibekali dengan pengetahuan mengenai SHEA, untuk mengetahui tiap kategori pelecehan dan tahu bagaimana menghadapinya. Dengan bersemangat, Ruby juga menjelaskan mengenai 10 Prinsip Dasar Kepemimpinan Feminist yang menjadi bekal untuk perlindungan terhadap SHEA.

• 10 Prinsip Dasar Kepemimpinan Feminis



- 1) **Kesadaran Diri:** Saya akan selalu menjaga ego, sehingga bisa mengarahkannya dengan penuh empati dan pikiran terbuka. Saya akan berusaha menerima kerentanan diri saya, serta mengenali dan menghargai kekuatan saya dan orang lain.



- 2) **Perawatan Diri dan Peduli pada Sesama:** Saya akan memperhatikan kesejahteraan emosi dan fisik, agar bisa memperbarui sumber inspirasi dan kasih sayang dari dalam batin sehingga akan dapat terus memberikan yang terbaik bagi rekan kerja. Saya akan mendorong dan mendukung rekan lain melakukan hal yang sama, secara aktif mendorong lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan mendukung, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab perawatan.



- 3) **Membongkar Bias:** Saya mengakui bahwa masyarakat memberi saya (dan orang lain) kelebihan khusus tanpa diminta atau dicari (contohnya, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kasta, kemampuan, orientasi seksual, pendidikan atau faktor-faktor lain). Saya akan ikut membuka dan menolak bentuk-bentuk diskriminasi tersebut dalam keseharian praktik dan kebijakan di tempat kerja. Saya akan menyadari bagaimana hak privasi saya dapat membuat rekan lain merasa tidak berdaya dan inferior, serta bagaimana saya bereaksi terhadap hak privasi rekan lain, dan dengan hati-hati mengubah perilaku saya dalam memperlakukan semua rekan secara setara.



- 4) **Inklusi:** Saya akan menciptakan cara bagi setiap orang agar dapat didengar secara setara, dihormati/dihargai dan sukses dalam tim dan organisasi saya. Saya akan mendesak diri saya untuk membangun tim yang beragam dan inklusif dan mengenali dan menanggapi hambatan-hambatan yang berbeda untuk berpartisipasi.



- 5) **Berbagi Daya:** Saya menerima bahwa ujian tertinggi dari kepemimpinan saya adalah menciptakan ruang bagi rekan lain untuk memimpin. Melibatkan tim saya dalam menetapkan tujuan-tujuan bersama, saya akan mempercayai dan memberdayakan mereka untuk berbagi kepemimpinan dengan saya dalam meraih tujuan-tujuan tersebut. Demikian juga, Saya akan mempercayai dan mendukung mereka pada kewenangan-kewenangan di posisinya untuk memandu saya dalam kepentingan-kepentingan terbaik misi kami.



- 6) **Penggunaan Daya yang Bertanggung Jawab dan Transparan:** Saya akan jelas, tepat waktu, dan transparan dalam membuat keputusan yang dipercayakan kepada saya, dengan konsultasi yang memadai dan sesuai kepentingan-kepentingan dalam misi kami. Jika terlibat dalam pengalokasian sumber daya dan memilih mitra, saya akan memastikan pilihan-pilihan tersebut mempromosikan nilai Yappika-ActionAid dan aspirasi. Saya akan mengkomunikasikan keputusan dan alasan-alasan kepada mereka secara terbuka.



- 7) **Kolaborasi yang Bertanggung Jawab:** Saya akan memastikan bahwa tujuan-tujuan ditetapkan secara jelas dan dimiliki bersama, dan meminta semua anggota tim, termasuk saya sendiri, untuk secara kuat bertanggung jawab pada upaya-upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Saya akan mengukur pencapaian saya sendiri melalui kontribusi yang saya buat pada kesuksesan tim.



- 8) **Umpan Balik yang Hormat:** Saya akan mencari, memberi dan menghargai umpan balik yang konstruktif sebagai sebuah kesempatan pembelajaran dua arah. Saya tidak akan menunggu evaluasi resmi – Saya malah akan mempraktikkan umpan balik berkelanjutan, vertikal (kepada rekan kerja) dan bawah ke atas (kepada manajer saya dan semua yang lebih senior dari saya) serta bawah ke atas (kepada tim yang saya kelola). Saya akan bekerja untuk menyelesaikan konflik dengan cara aktif mendengarkan, intervensi tepat waktu, dan mempromosikan anti kekerasan dan komunikasi dan perilaku penuh penghormatan.



- 9) **Keberanian:** Saya akan terus mengarah pada perubahan transformative, mencari gagasan baru dan pembelajaran dari kesalahan dari pada mencemaskan kegagalan, dan mendorong rekan satu tim untuk melakukan hal serupa. Ketika saya menemukan sikap menyerah atau sinisme dalam diri saya dan rekan lain, saya akan berjuang untuk memulihkan keyakinan pada tujuan kami; ketika ada persaingan atau ketidakamanan atas status dan wilayah, saya akan membangun kepercayaan; ketika saya merasa puas diri atau biasa-biasa saja saya akan memperbarui semangat dan kreativitas untuk mencapai misi kami.



- 10) **Tanpa (No) Toleransi:** Saya akan menyampaikan apa pun bentuk diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan yang saya lihat atau alami di tempat kerja, dan memungkinkan dan mendukung secara aman mereka yang ada di sekitar saya untuk melakukan hal serupa. Saya akan memastikan tingkah laku saya sendiri bebas dari semua bentuk pelecehan, eksploitasi, dan penyalahgunaan.

YAPPIKA-ActionAid



YAPPIKA-ActionAid



yappika



yappikaactionaid



yappika-actionaid

www.yappika-actionaid.or.id

